

PROFIL DESA SIMOANGIN-ANGIN

2024



DAFTAR ISIAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: SIMOANGIN-ANGIN Kecamatan: Wonoayu Kabupaten: KAB. SIDOARJO Provinsi: JAWA TIMUR Bulan: 2 Tahun: 2024

Nama Pengisi: FATKHUR ROZI
Pekerjaan: OPERATOR
Jabatan: KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Kepala DESA / Lurah: KUSNIADI
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
Referensi 1: BUKU KRETEK DESA
Referensi 2:
Referensi 3:
Referensi 4:

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk			
Jumlah		Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini		1857 orang	1828 orang
Jumlah penduduk tahun lalu		1394 orang	1665 orang
Persentase perkembangan		33.21 %	9.79 %
B. Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	1004 KK	37 KK	1041 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	925 KK	36 KK	961 KK
Prosentase Perkembangan	8.54 %	2.78 %	
II. EKONOMI MASYARAKAT			
A. Pengangguran			

A. Pengangguran	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	2034 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	234 Orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	10 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	1780 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	5 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	3 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	2 orang

B. Kesejahteraan Keluarga	
1. Jumlah keluarga prasejahtera	240 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	450 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	271 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	40 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	40 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	1041 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Kacang kedelai	5	2	0	300000	500000	300000	4000000
Kangkung	15	3	0	600000	1000000	400000	6000000
Kacang Hijau	10	6	0	300000	300000	1000000	4000000
Padi sawah	28	7	0	1500000	400000	1200000	6000000

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Cengkeh	0	0	0	0	0	0	0

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Jumlah Ternak (Ekor)
Air liur burung walet	0 1746	0	0	0	0
-					

D. SUBSEKTOR PERIKANAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)	Jenis usaha perikanan
Lele	1	0	5000000	500000	5500000	0

E.	SEKTOR	PERTA	MBANG	AN DAI	N GALIAN

Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00

Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan	
Total nilai hahan nanalang yang digunakan	Rp. 0,00
	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada	0 jenis
F. SUBSEKTOR KERAJINAN	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 50.000.000,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 23.000.000,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 10.000.000,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 33.000.000,00
Total jenis kerajinan rumah tangga	0 jenis
Total Jone North Tarrian tangga	0 10.110
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN	
G.1. Subsektor Industri Pangan	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 50.000.000,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 15.000.000,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 15.000.000,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 35.000.000,00
Total jumlah jenis industri tsb yang ada	2 jenis
Iolar Juman Jenis industri tsu yang ada	Z JEIIIS
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	
·	
I.1. Subsektor Perdagangan Besar	
Total nilai transaksi	Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan yang ada	Rp. 0,00
Total jumlah jenis perdagangan besar	Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Total biaya antara lainnya	Rp. 0,00
12 Cubacitas Bardananan Farra	
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran	
Jumlah total jenis perdagangan eceran	0 jenis
Total nilai transaksi	Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan eceran	Rp. 0,00
I.3. Subsektor Hotel	
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada	0 jenis
Jumlah total pendapatan	Rp. 0,00
Jumlah total biaya pemeliharaan	Rp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0,00
odinari total portadpatan yang diporoton	17.0,00
I.4. Subsektor Restoran	
I.4. Subsektor Restoran Jumlah tempat penyediaan konsumsi	0 Unit
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi	Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya	Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1,500.000.000,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah ilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jimlah lembaga keuangan bukan bank Jimlah transaksi lembaga keuangan bukan bank Jimlah lembaga keuangan bukan bank Jimlah segiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah iniai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 O unit
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah hilah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Jumlah segiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Dumlah segiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Dumlah segiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Dumlah segiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Diaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 O unit Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah suaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Qunit Rp. 0,00 Qunit Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah hilah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Jumlah segiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Dumlah segiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Dumlah segiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Dumlah segiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Diaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 O Unit O Jenis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 O unit Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Qunit Rp. 0,00 Qunit Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan Biaya lainnya	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 0 Unit 0 Jenis Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah ilai transaksi perbankan Jumlah biaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah hembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah sepiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya lainnya K.4. Subsektor Jasa Perusahaan	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah hilai transaksi perbankan Jumlah hilai hilai transaksi perbankan Jumlah siaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan Biaya lainnya K.4. Subsektor Jasa Perusahaan Jumlah perusahaan jasa	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang akleuarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah thaya yang dikeluarkan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah tenbaga keuangan bukan bank Jumlah tenbaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapai Biaya yang dikeluarkan K.4. Subsektor Jasa Perusahaan Biaya lainnya	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Jumlah tempat penyediaan konsumsi Biaya konsumsi yang dikeluarkan Biaya antara lainnya Jumlah total pendapatan yang diperoleh J. Sektor Bangunan/Konstruksi Jumlah bangunan yang ada tahun ini Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan Total nilai bangunan yang ada Biaya antara lainnya K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan K.1. Subsektor Bank Jumlah transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah nilai transaksi perbankan Jumlah hilai transaksi perbankan Jumlah hilai transaksi perbankan K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank Jumlah lembaga keuangan bukan bank Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank Biaya yang dikeluarkan K.3. Subsektor Sewa Bangunan Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah Total nilai persewaan yang dicapal Biaya yang dikeluarkan Biaya lainnya K.4. Subsektor Jasa Perusahaan Jumlah perusahaan jasa	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 7 unit Rp. 697.615.881,00 Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00

L. SEKTOR JASA-JASA			
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum			
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat			10 unit
Juliiali jelis jasa perayanan pemeninahan kepada masyarakat			10 unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat			Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan			Rp. 0,00
L.2. Subsektor jasa swasta			
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat			0 jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial			Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan			Rp. 0,00
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi			
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi			0 jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi			Rp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan			Rp. 0,00
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga			
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga			0 jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga			Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga			Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan			Rp 0,00
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI			
III. GERTOR ANGROTAN DAN ROMONINAGI			
M.1. Subsektor Angkutan			
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyet	eranga	n	1 Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan			14 Unit
Nilai total transaksi pengangkutan			Rp 50.000.000,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan			Rp 25.000.000,00
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM			
N.1. Subsektor Listrik			
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik			0 Jenis
Jumlah nilai produksi listrik			Rp 0,00
Jumlah total nilai transaksi			Rp 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan			Rp 0,00
N.2. Subsektor Gas			
Jumlah kegiatan penyediaan gas			0 jenis
Nilai aset produksi gas			Rp 0,00
Nilai transaksi			Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan			Rp 0,00
N.3. Subsektor Air Minum			
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum			0 jenis
Nilai aset penyediaan air minum			Rp 0,00
Nilai produksi air minum			Rp 0,00
Nilai transaksi air minum			Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan			Rp 0,00
NV PENDADATAN PEDIKAPITA			
IV. PENDAPATAN PERKAPITA			
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha			
A.1.			
1. Jumlah rumah tangga		1041 Keluarg	a
2. Jumlah total anggota rumah tangga		3685 orang	
3. Jumlah rumah tangga buruh tani		60 Keluarga	
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh		240 orang	200
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga		Rp 1.000.000	,,∪∪
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA	Т		
		10/11/21/	
Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Anggota Keluarga	_	1041 KK 3685 orang	
Jumlah Anggota Keluarga Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga		3685 orang Rp 4.000.000,	00
Jumlah pendapatan kepala keluarga yang bekerja		Rp 2.000.000,	
		,	
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR			
1. Sektor Pertanian			
	56 oran		
	60 oran	•	
Pemilik Usaha Tani	119 ora	ng	
2. Sektor Perkebunan			
	0 orang		
	0 orang		
Pemilik usaha Perkebunan	0 orang	l	

1 orang 24 orang

3. Sektor Peternakan

Peternakan Perorangan Buruh Usaha Peternakan

Pemilik Usaha Peternakan	1 orang	
4. Sektor Perikanan		
Nelayan	4 orang	
	6 orang	
Pemilik Usaha Perikanan		
Fellilik Osalia Felikalian	0 orang	
5. Sektor Kehutanan		
Pengumpul Hasil Hutan	0 orang	
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang	
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang	
r orman Country organization ration	o orang	
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C		
	0	
Penambang Galian C Perorangan	0 orang	
Buruh Usaha Pertambangan	0 orang	
Pemilik Usaha Pertambangan	0 orang	
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga		
8. Sektor Industri Menengah dan Besar		
Karyawan perusahaan swasta	500 orang	
Karyawan perusahaan pemerintah	57 orang	
Pemilik perusahaan		
Permink perusanaan	10 orang	
l .		
9. Sektor Perdagangan		
	_	
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	5 orang	
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	50 orang	
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	10 orang	
Tongusena i Vidagangan Hasii Bunii	10 Orally	
10. Sektor Jasa		
	_	
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	2 orang	
Kontraktor	5 orang	
TNI		
	2 orang	
Guru swasta	20 orang	
Seniman/artis	3 orang	
Jasa penyewaan peralatan pesta	5 orang	
odsa penyewaan penalatan pesta	o orang	
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT		
A. ASET TANAH		
Tidak memiliki tanah		
		0 orang
Memiliki tanah antara 0.1-0.2 ha		-
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha		100 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha		100 orang 20 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha		100 orang 20 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha		100 orang 20 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 0 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,50-10 ha		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,01-0,50 ha memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,01-0,50 ha memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,01-0,50 ha memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 2 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 2 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki bus		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 2 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki bus C. ASET SARANA PRODUKSI		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 9 orang 10 orang 10 orang 11 orang 12 orang 13 orang 14 orang 15 orang 16 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki penggilingan padi		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 9 orang 10 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki bus		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 9 orang 10 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki bus C. ASET SARANA PRODUKSI Memiliki penggilingan padi Memiliki traktor		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 9 orang 10 orang 10 orang 11 orang 12 orang 13 orang 14 orang 15 orang 16 orang 17 orang 18 orang 19 orang 19 orang 19 orang 10 orang 10 orang 10 orang 11 orang 12 orang 13 orang-10 unit
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki traktor Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 1 orang 4 orang 5 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki traktor Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki kapal penangkap ikan		100 orang 20 orang 0 orang 2 orang 0 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 1 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki traktor Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 1 orang 4 orang 5 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki paggilingan padi Memiliki raktor Memiliki traktor Memiliki pagpikingan padi Memiliki pagpikingan padi Memiliki paspik pengolahan hasil pertanian Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan		100 orang 20 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 1 orang 2 orang 2 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 1 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki bus C. ASET SARANA PRODUKSI Memiliki traktor Memiliki traktor Memiliki tanah pasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil pertanian Memiliki kalat pengolahan hasil pertanan Memiliki alat pengolahan hasil perternakan		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 1 orang 0 orang 2 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 1 orang 3 orang-10 unit
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki alat pengolahan hasil pertenakan Memiliki alat pengolahan hasil pertenakan Memiliki alat pengolahan hasil peternakan Memiliki alat pengolahan hasil peterbakan		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang 7 orang 8 orang 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk C. ASET SARANA PRODUKSI Memiliki pengolihnan hasil pertanian Memiliki traktor Memiliki tanah lebih pengolahan hasil pertanian Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki alat pengolahan hasil pertkanan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil petkebunan Memiliki alat pengolahan hasil petkebunan Memiliki alat pengolahan hasil petkebunan		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 2 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki alat pengolahan hasil pertenakan Memiliki alat pengolahan hasil pertenakan Memiliki alat pengolahan hasil peternakan Memiliki alat pengolahan hasil peterbakan		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang 7 orang 8 orang 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki basah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki bus C. ASET SARANA PRODUKSI Memiliki penggilingan padi Memiliki traktor Memiliki traktor Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil pertanan Memiliki alat pengolahan hasil pertanan Memiliki alat pengolahan hasil pertenban Memiliki alat pengolahan hasil pertenban Memiliki alat pengolahan hasil pertenban Memiliki alat pengolahan hasil pertenbana Memiliki alat pengolahan hasil pertembana Memiliki alat pengolahan hasil pertembanan Memiliki alat pengolahan hasil pertembanan Memiliki alat pengolahan hasil pertembanan Memiliki alat pengolahan hasil pertembangan		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 0 orang 1 orang 2 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah belbi dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki traktor Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki alat pengolahan hasil pertanan Memiliki alat pengolahan hasil peternakan Memiliki alat pengolahan hasil peternakan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata		100 orang 20 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 1 orang 6 orang 7 orang 8 orang 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang 7 orang 8 orang 9 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki bes C. ASET SARANA PRODUKSI Memiliki penggilingan padi Memiliki traktor Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki alat pengolahan hasil perikanan Memiliki alat pengolahan hasil pertenbana Memiliki alat pengolahan hasil pertenbana Memiliki alat pengolahan hasil peternakan Memiliki alat pengolahan hasil peterbahan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil petrambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil partambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil partambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil partambangan		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 1,0 ba Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki barah penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki traktor Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil pertkanan Memiliki alat pongolahan hasil pertkanan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata		100 orang 20 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 1 orang 6 orang 7 orang 8 orang 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang 7 orang 8 orang 9 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki besak Memiliki pengglingan padi Memiliki pengglingan padi Memiliki traktor Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki kapal penangkap ikan Memiliki alat pengolahan hasil perikanan Memiliki alat pengolahan hasil pertenbana Memiliki alat pengolahan hasil pertenbana Memiliki alat pengolahan hasil peternakan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil partambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil partambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil partambangan Memiliki dalat produksi dan pengolah hasil partambangan		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah lantara 1,0 - 6,0 ha Memiliki tanah lantara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah lantara 1,0 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki bacak Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil pertanan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil pertambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 2 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 10,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 10,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 10,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 10,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 -5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 -5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 ha Memiliki tanah latera 1,0 ha Memiliki tanah latera 1,0 ha Memiliki besak Memiliki besak Memiliki besak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki tanah natipetranian Memiliki tanah natipetranian Memiliki ata pengolahan hasil pertanian Memiliki ata pengolahan hasil pertanakan Memiliki ata pengolahan hasil pertanakan Memiliki ata pengolahan hasil perkebunan Memiliki ata pengolahan hasil perkebunan Memiliki ata pengolahan hasil perkebunan Memiliki ata produksi dan pengolah hasil ndustri piasa perdagangan Memiliki ata produksi dan pengolah hasil industri migas		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 2 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah lantara 1,0 - 6,0 ha Memiliki tanah lantara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah lantara 1,0 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki bacak Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil pertanan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil pertambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 2 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jurnlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan hasil pertanian Memiliki patrik pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil pertanahan Memiliki alat pengolahan hasil petrankan Memiliki alat pengolahan hasil petrankan Memiliki alat pengolahan hasil petrankan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil petrambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 10,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 10,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 10,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 10,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 -5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 -5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 ha Memiliki tanah latera 1,0 ha Memiliki tanah latera 1,0 ha Memiliki besak Memiliki besak Memiliki besak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki tanah natipetranian Memiliki tanah natipetranian Memiliki ata pengolahan hasil pertanian Memiliki ata pengolahan hasil pertanakan Memiliki ata pengolahan hasil pertanakan Memiliki ata pengolahan hasil perkebunan Memiliki ata pengolahan hasil perkebunan Memiliki ata pengolahan hasil perkebunan Memiliki ata produksi dan pengolah hasil ndustri piasa perdagangan Memiliki ata produksi dan pengolah hasil industri migas		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 2 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jurnlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan hasil pertanian Memiliki patrik pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil pertanahan Memiliki alat pengolahan hasil petrankan Memiliki alat pengolahan hasil petrankan Memiliki alat pengolahan hasil petrankan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil petrambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah helbih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki pengilingan padi Memiliki tanah antara 5,0 - Memiliki tanah antara 1,0 may tanah t		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0-5,0 ha Memiliki tanah ebih dari 10 ha Jumlah total penduduk C. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggliingan padi Memiliki pabrik pengglahan hasil pertanian Memiliki pabrik pengglahan hasil pertanian Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil pertanbangan Memiliki alat pengolahan hasil pertanbangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertanbangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertanbangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri migas Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Tembok RUMAH MENURUT LANTAI		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 1 orang 6 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah helbih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki pengilingan padi Memiliki tanah antara 5,0 - Memiliki tanah antara 1,0 may tanah t		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 2 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0-5,0 ha Memiliki tanah ebih dari 10 ha Jumlah total penduduk C. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggliingan padi Memiliki pabrik pengglahan hasil pertanian Memiliki pabrik pengglahan hasil pertanian Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil pertanbangan Memiliki alat pengolahan hasil pertanbangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertanbangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertanbangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri migas Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri migas D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING Tembok RUMAH MENURUT LANTAI		100 orang 20 orang 0 orang 0 orang 0 orang 119 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 1 orang 6 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki kapat penangkap ikan Memiliki alat pengolahan hasil perkanan Memiliki alat pengolahan hasil perkabunan Memiliki alat pengolahan hasil pertambangan Memiliki alat pengolahan hasil pertambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan		100 orang 20 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,91-0,0 ha Memiliki tanah antara 0,91-0,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah intara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah intara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah intara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah intara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah intara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah intara 5,0 - 10 ha Memiliki banah intara 5,0 - 10 ha Memiliki janah janah intara 5,0 - 10 ha Memiliki janah janah intara 5,0 - 10 ha Memiliki janah ja		100 orang 20 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki kapat penangkap ikan Memiliki alat pengolahan hasil perkanan Memiliki alat pengolahan hasil perkabunan Memiliki alat pengolahan hasil pertambangan Memiliki alat pengolahan hasil pertambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan Memiliki alat produksi dan pengolah hasil nutari pasa perdagangan		100 orang 20 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki beadh Memiliki beadh Memiliki beadh Memiliki beadh Memiliki beadh Memiliki beadh Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki pataki pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil perkanan Memiliki alat pengolahan hasil perkanan Memiliki alat pengolahan hasil perkanan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil hutan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil hutan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil hutan Memiliki alat pengolahan hasil hutan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan Memiliki alat pengolahan hasil hutan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan		100 orang 20 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang 7 orang 8 orang 9 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang 7 orang 8 orang 9 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki becak Memiliki penglingan padi Memiliki patir kengolahan hasil pertanian Memiliki patir kengolahan hasil pertanian Memiliki alah pengolahan hasil pertanian Memiliki alah pengolahan hasil pertanian Memiliki alah pengolahan hasil pertanbangan Memiliki alah pengolahan hasil pertanbangan Memiliki alah pengolahan hasil pertanbangan Memiliki alah produksi dan pengolah hasil pariwisata Memiliki alah produksi dan pengolah hasil pariwisata Memiliki alah produksi dan pengolah hasil pariwisata Memiliki alah produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah Memiliki alah produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah Memiliki alah produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah Memiliki alah produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah Memiliki alah produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah Memiliki alah produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah Memiliki alah produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah Memiliki alah produksi dan pengolah hasil industri migas		100 orang 20 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 0 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha Memiliki tanah antara 0,31-0,5 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha Memiliki tanah antara 0,0-1,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha Memiliki tanah antara 1,0 - 0 ha Memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha Memiliki tanah lebih dari 10 ha Jumlah total penduduk B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki becak Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki penggilingan padi Memiliki jabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki jabrik pengolahan hasil pertanian Memiliki alat pengolahan hasil perkanan Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan		100 orang 20 orang 0 orang 1 orang 0 orang 1 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang 7 orang 8 orang 9 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang 7 orang 8 orang 9 orang

Beton		25	rumah
# PENN # / A A A A E E F / O A O A A A A A A A A A A A A A A A A			
II. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA			
umlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya		11	041 Keluarga
umlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya			00 Keluarga
umlah keluarga memiliki ternak kecil			0 Keluarga
umlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah			000 Keluarga
umlah keluarga memiliki perusahaan industri kecil			Keluarga
III. PENDIDIKAN MASYARAKAT			
. Tingkat Pendidikan Penduduk			
umlah penduduk buta aksara dan huruf latin		0 orang	
umlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak		93 orang	
umlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental		13 orang	
umlah penduduk sedang SD/sederajat		294 orang	
umlah penduduk tamat SD/sederajat		437 orang	
umlah penduduk tidak tamat SD/sederajat		87 orang	
umlah penduduk sedang SLTP/sederajat		268 orang	
umlah penduduk tamat SLTP/sederajat		123 orang	
umlah penduduk sedang SLTA/sederajat umlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat		251 orang	
umlah penduduk tamat SLTA/Sederajat		54 orang 1397 orang	
umlah penduduk tariat SETA/Sederajat umlah penduduk sedang D-1		0 orang	
ımlah penduduk sedang D-1		13 orang	
umlah penduduk tamat b-1 umlah penduduk sedang D-2		0 orang	
umlah penduduk sedang 5-2		5 orang	
umlah penduduk sedang D-3		15 orang	
umlah penduduk tamat D-3		68 orang	
umlah penduduk sedang S-1		60 orang	
umlah penduduk tamat S-1		173 orang	
umlah penduduk sedang S-2		4 orang	
umlah penduduk tamat S-2		4 orang	
umlah penduduk tamat S-3		2 orang	
umlah penduduk sedang SLB A		0 orang	
umlah penduduk tamat SLB A		0 orang	
umlah penduduk sedang SLB B umlah penduduk tamat SLB B		1 orang 0 orang	
umlah penduduk sedang SLB C		0 orang	
umlah penduduk tamat SLB C		0 orang	
umlah penduduk cacat fisik dan mental		13 orang	
·			
s. Wajib belajar 9 tahun		<u> </u>	
. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun		613 orang	
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah		613 orang	
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah			
		0 orang	
		0 orang	
C. Rasio Guru dan Murid			
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak		10 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak r. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak		10 orang 93 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak t. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak i. Jumlah guru SD dan sederajat		10 orang 93 orang 17 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang 0 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah guru SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah siswa SLTP dan sederajat Jumlah siswa SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah guru SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah giru SLTA/sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah guru SLB Melembagaan Pendidikan Masyarakat Jumlah perpustakaan desa/kelurahan		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB b. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah taman bacaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliliing umlah sanggar belajar		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB 6. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah taman bacaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliling umlah sanggar belajar umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB 6. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat cumlah perpustakaan desa/kelurahan cumlah taman bacaan desa/kelurahan cumlah perpustakaan keliling cumlah sanggar belajar cumlah sanggar belajar cumlah kelompok belajar Paket A		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliling umlah sanggar belajar umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah umlah kelompok belajar Paket A umlah peserta ujian Paket A		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB 9. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah taman bacaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliling umlah sanggar belajar umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah umlah kelompok belajar Paket A umlah kelompok belajar Paket A		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TS dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliling umlah sanggar belajar umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah umlah kelompok belajar Paket A umlah peserta ujian Paket A umlah Peserta ujian Paket B umlah Peserta ujian Paket B		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB P. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah taman bacaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliliing umlah sanggar belajar umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah umlah kelompok belajar Paket A umlah kelompok belajar Paket B		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB P. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliling umlah sanggar belajar umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah umlah kelompok belajar Paket A umlah peserta ujian Paket B umlah Peserta ujian Paket B umlah Peserta ujian Paket C umlah peserta ujian Paket C		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah taman bacaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliling umlah sanggar belajar umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah umlah peserta ujian Paket A umlah peserta ujian Paket B umlah kelompok belajar Paket B umlah kelompok belajar Paket B umlah Peserta ujian Paket C umlah peserta ujian Paket C		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah siswa SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLB Jumlah siswa SLB Jumlah guru SLB Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kejatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah peserta ujian Paket C		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah taman bacaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliling umlah sanggar belajar umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah umlah kelompok belajar Paket A umlah peserta ujian Paket B umlah Peserta ujian Paket B umlah peserta ujian Paket C umlah peserta ujian Paket C umlah peserta ujian Paket C umlah peserta kursus keterampilan umlah peserta kursus keterampilan		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah guru SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah siswa SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah giru SLTA/sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB I. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah lembaga kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan		10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTd dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB . Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah taman bacaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliling umlah sanggar belajar umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah umlah kelompok belajar Paket A umlah kelompok belajar Paket B umlah peserta ujian Paket B umlah Peserta ujian Paket B umlah peserta ujian Paket C umlah peserta ujian Paket C umlah peserta ujian Paket C umlah peserta kursus keterampilan	Jan	10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah guru SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLB 0. Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kediatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah lembaga kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah bumlah lumlah lum	19 orang	10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah giswa SLTP dan sederajat Jumlah giswa SLTA/sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah beserta bariah Jumlah bariah J	0 orang	10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB . Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan keliliing Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah lembaga kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah ibu hamil Jumlah ibu hamil Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	0 orang 19 orang	10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah guru SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah siswa SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLB D. Jumlah guru SLB . Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah gerpustakaan desa/kelurahan umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliling umlah sanggar belajar umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah umlah kelompok belajar Paket A umlah peserta ujian Paket A umlah peserta ujian Paket B umlah kelompok belajar Paket B umlah kelompok belajar Paket C umlah peserta ujian Paket C umlah peserta ujian Paket C umlah peserta kursus keterampilan umlah lembaga kursus keterampilan umlah iben hamil umlah ibu hamil umlah ibu hamil periksa di Posyandu umlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	0 orang 19 orang 19 orang	10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah guru SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB . Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Jumlah guru SLB . Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah Peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah ibu hamil Jumlah ibu hamil Jumlah ibu hamil Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	0 orang 19 orang 19 orang 4 orang	10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah guru SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB . Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah taman bacaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliling umlah sanggar belajar umlah kelompok belajar Paket A umlah kelompok belajar Paket A umlah kelompok belajar Paket B umlah kelompok belajar Paket B umlah Peserta ujian Paket B umlah Peserta ujian Paket C umlah peserta ujian Paket C umlah peserta kursus keterampilan umlah peserta kursus keterampilan umlah peserta kursus keterampilan umlah ibu hamil umlah ibu hamil umlah ibu hamil umlah ibu hamil periksa di Posyandu umlah ibu hamil periksa di Posyandu umlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit umlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek umlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	0 orang 19 orang 19 orang 4 orang 15 orang	10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah siswa SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah guru SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah Peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah ibu hamil Jumlah ibu hamil Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	0 orang 19 orang 19 orang 4 orang 15 orang 0 orang	10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak Jumlah guru SD dan sederajat Jumlah siswa SD dan sederajat Jumlah siswa SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah guru SLTP dan sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLTA/sederajat Jumlah siswa SLB D. Jumlah guru SLB . Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Jumlah guru SLB . Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan desa/kelurahan Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah lembaga kursus keterampilan Jumlah lembaga kursus keterampilan Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	0 orang 19 orang 19 orang 4 orang 15 orang	10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah guru SD dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP den sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB 0. Jumlah guru SLB 0. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah perpustakaan desa/kelurahan umlah perpustakaan keliling umlah sanggar belajar umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah umlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah umlah kelompok belajar Paket A umlah kelompok belajar Paket B umlah Peserta ujian Paket B umlah Peserta ujian Paket C umlah ibu hamil periksa di Posyandu umlah ibu hamil periksa di Posyandu umlah ibu hamil periksa di Puskesmas umlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek umlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek umlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek umlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih umlah ibu hamil melahirkan	0 orang 19 orang 19 orang 4 orang 15 orang 0 orang	10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	
. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak . Jumlah siswa TS dan sederajat . Jumlah siswa SD dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTP dan sederajat . Jumlah siswa SLTP dan sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah guru SLTA/sederajat . Jumlah siswa SLB 0. Jumlah siswa SLB 0. Jumlah guru SLB D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Lumlah perpustakaan desa/kelurahan Lumlah perpustakaan keliling Lumlah senggar belajar Lumlah kejatan lembaga pendidikan luar sekolah Lumlah peserta ujian Paket A Lumlah peserta ujian Paket B Lumlah Peserta ujian Paket C Lumlah lembaga kursus keterampilan	0 orang 19 orang 19 orang 4 orang 15 orang 0 orang 0 orang 0 orang	10 orang 93 orang 17 orang 294 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang	

B. Academ Sorty 4 cmay Line Collegation Workshapes 4 cmay Line Collegation Workshapes 2 cmay Line Colle		
jumb by pire 12 cong 1	B. Kualitas Bayi	
jumb by pire 12 cong 1	Jumlah keguguran kandungan	4 orang
Common Service Control		
Jacobs Lagor May 2012 - 1 Tables Journal Journal Agent Agen	Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Auchite for misuser 1 - 12 colors Auchite for price feet misuser of a 2 de general auchite fair feet misuser of a 2 de general auchite fair feet feet misuser of a 2 de general auchite fair feet feet feet feet feet feet feet fee	Jumlah bayi lahir hidup	
Laster specified to sort intering plate 5 (5 kg) C. Goaline Persisten Tergal position for plate South Union Tergal position for plat	Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 orang
Academy and a second process a	Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
C. Cuadata Parapillon Tropped Parapillon Tropped Parapillon Humb Bossan Energl eparapillon Humb Bossan Energl eparapillon Humb Bossan Energl eparapillon Humb Bossan Energl eparapillon Education Debarrose Energl eparapillon Cardinator Debarrose En	Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0 orang
Transport President Frequency provision Braid Salt Union President Provision Districts President Resident Provision Districts President Resident Resident Districts President Resident Resident Districts President Resident President President Resident President President Resident Resident President President Resident	Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0 orang
Transport President Frequency provision Braid Salt Union President Provision Districts President Resident Provision Districts President Resident Resident Districts President Resident Resident Districts President Resident President President Resident President President Resident Resident President President Resident		
Transport President Frequency provision Braid Salt Union President Provision Districts President Resident Provision Districts President Resident Resident Districts President Resident Resident Districts President Resident President President Resident President President Resident Resident President President Resident	C. Kualitas Persalinan	
Travest personal forms Service (1997) From all personal final Securities (19		
Tograph provision Presiscences From provision Presiscences From provision From Presiscence From provision From Presiscence From Presis	Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	0 unit
Tograph provision Presiscences From provision Presiscences From provision From Presiscence From provision From Presiscence From Presis	Tempat persalinan Rumah Bersalin	0 unit
Transpic Generalism Data Forestran Davisach Transpic permishins many parkabi Osbor Transpic permishins many parkabi Osbor Transpic Generalism Tran	Tempat persalinan Puskesmas	1 unit
Temper position numer protects bothen Temper positions down Tempe positions down Tempe positions down Tempe positions down Tempe pos	Tempat persalinan Polindes	0 unit
Target planes debter () unit Vound section	Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Rumsh dudum Perkamba soudill Perkamba so	Tempat persalinan rumah praktek bidan	1 unit
Remote persention Pertolongua Persention Autrino Persention discognigation of discognitude in the control of	Tempat praktek dokter	1 unit
Professigner Persentinen Luman Percentinen dieterg Doter Luman Decellation dieterg Doter De Verbaldung De V	Rumah dukun	0 unit
Journity Persistant discloreg Dotter 10 decident 22 decidents 22 decidents 22 decidents 23 decidents 23 decidents 24 decidents	Rumah sendiri	0 unit
Journity Persistant discloreg Dotter 10 decident 22 decidents 22 decidents 22 decidents 23 decidents 23 decidents 24 decidents		
Journity Persistant discloreg Dotter 10 decident 22 decidents 22 decidents 22 decidents 23 decidents 23 decidents 24 decidents	Pertolongan Persalinan	
Junchin persistant distoring persists 10 Indision 10 Indison 10 Indision 10 Indison	•	10 tindakan
Justinity persolation of distring personal (Justinity persolation) (Indistring Justinity Persolation) (Indistring Persolation) (Indistring Justinity Persolation) (Indistring Justinity Persolation) (Indistring Persola	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Justich prasilation distoring dutump to breath justice processing and processing		
Jurnah Derivanta diotong kelanga D. Cakapan Imuniseas Furnah Beyi nut Zobien Jurnah Beyin nut Zobien		
D. Cakapan Invanisesi Junnish Barj Valler Invanisesi PPF-1, BCG dan Polo-1 Jinnish Barj Valler Invanisesi PPF-1, BCG dan Polo-2 Junnish Barj Valler Invanisesi PPF-1, BCG dan Polo-2 Junnish Barj Valler Valler Junnish Barj Valler Valler Junnish Barj Valler Valler Junnish Barj Valler Valler Junnish Barj Valler Junnish	· · ·	
Junish Bay Sub Dai Name Humans DFT. BCG dan Peto - 1 10 crang Junish Bay 2 but Bar Humans DFT. BCG dan Peto - 1 10 crang Junish Bay 2 but Bar Humans DFT. BCG dan Peto - 1 10 crang Junish Bay 2 but Bar yang minish Boy 12 dan Poto-2 8 orang Junish Bay 2 but Bar yang minish Boy 12 dan Poto-3 10 crang Junish Bay 2 but Bar yang minish Boy 12 dan Poto-3 10 crang Junish Bay 2 but Bar yang minish Bay 1 but Bar 2 dan Bar		
Junish Bay Sub Dai Name Humans DFT. BCG dan Peto - 1 10 crang Junish Bay 2 but Bar Humans DFT. BCG dan Peto - 1 10 crang Junish Bay 2 but Bar Humans DFT. BCG dan Peto - 1 10 crang Junish Bay 2 but Bar yang minish Boy 12 dan Poto-2 8 orang Junish Bay 2 but Bar yang minish Boy 12 dan Poto-3 10 crang Junish Bay 2 but Bar yang minish Boy 12 dan Poto-3 10 crang Junish Bay 2 but Bar yang minish Bay 1 but Bar 2 dan Bar	D. Cakupan Imunisasi	
Jumith bay intil 5 blain Jumith bay intil 5		12 orang
Jumith bey 1 sub a year juminessi DPT-2 dan Polic-2 8 orang Jumith bey 1 sub any year juminessi DPT-2 dan Polic-2 8 orang Jumith bey 2 sub any year juminessi DPT-3 dan Polic-3 11 orang 11 oran		
Junish Del Sulari yang imminest DPT-2 dam Peloo 2 8 orang		·
Journal budy obses do Julian Jurnal budy of bud may my imunitised DPT's dain Polico 3 Jurnal budy of bud bunnyang imunitised campak Be orang Jurnal budy of bud bunnyang imunitised campak Be orang Jurnal budy of bud bunnyang imunitised campak Be orang Jurnal budy of bud bunnyang imunitised campak Be orang Jurnal budy of bud bunnyang imunitised campak Bernamental bunnyang managang unda section of the budy service of the section	•	
Jumish buy 6 buten yang imunisan DPT-0 dan Polics-3		
Juminah bigi b bulan yang imunisasi carepak 8 orang 0 orang 1	•	·
Duralish persistant search control of the	Jumlah bayi 9 bulan	
E-Perkembangan Pasangan Usis Subur dan KB Pasangan Usis Subur Junnah ramaja parti usis 12 - 17 tahun 55 orang Junnah ramaja parti usis 12 - 17 tahun 700 orang Junnah ramaja parti usis 12 - 17 tahun 700 orang Junnah ramaja parti usis 12 - 17 tahun 700 orang Junnah ramaja parti usis 12 - 17 tahun 700 orang Junnah sewata kewata mada usis kurang dari 16 bahun 700 orang Junnah pasangan usis subur 700 orang Junnah pasangan usis subur 700 orang Junnah pasangan usis subur 700 orang Junnah panggun anala kontrasepsi sunik 700 orang 700 orang Junnah panggun anala kontrasepsi sunik 700 orang 700 oran	Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	8 orang
Pasangan Usia Subur	Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	0 orang
Pasangan Usia Subur		
Pasangan Usia Subur	E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB	
Jurnals nemaja putri usia 12 - 17 tahun 56 orang		
Jumiah prempian usis subur 15 - 40 lahum 00 rang 0	·	65 orang
Jumiah pangan alak kontrasepai subur Keluarga Berencana Jumiah akangnir KB Jumiah pangangan alak kontrasepai sunik Jumiah panggan medode kontrasepai pila Jumiah panggan alak kontrasepai kontrasepai pila Jumiah panggan pilak mengganakan melode kontrasepai pilak panggan pilak mengganakan melode kontrasepai pilak panggan pilak mengganakan melode kontrasepai pilak pilak panggan pilak mengganakan pilak		
Sumah pengana usia subur Separana Sepa		
Jumlah pengguna alak bantrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tuhettorni Jumlah pengguna metode kontrasepsi me	lumlah pasangan usia suhur	
Jumlah pengguna alak bantrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tuhettorni Jumlah pengguna metode kontrasepsi me	ournair pasarigan usia subui	ooz pasangan
Jumlah pengguna alak bantrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tuhettorni Jumlah pengguna metode kontrasepsi me	ournair pasangan usia subui	002 padangan
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi bitaktori Jumlah pengguna metode kontrasepsi bitaktori Jumlah pengguna metode KB chat tradisional Jumlah PuS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Denam berdarah Jumlah PuS yang tidak menggunakan metode KB S. Angka menggunakan metode KB S. Angka harapan Hidup G. Angka Harapan Hidup G. Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan hidup penduduk Desalkelurahan Angka harapan hidup penduduk Desalkelurahan Angka harapan hidup penduduk Katupaten/fota Angka harapan hidup penduduk Kat	· · ·	oo pasangan
Jumlah pengguna nalt kontrasepsi kondom 10 orang	Keluarga Berencana	
Jumish pengguna metode kontrasepsi pil Jumish pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumish pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumish pengguna metode KB Kelenderik Salamish Jumish pengguna kalamish metode KB F. Wabah Penyakit Deman berdarah Jumish pengguna kalamish kelunga helipa kelungan Salamish Salamish Jumish kelunga helipa kalamish Jumish kelunga menggunakan sumur gali Jumish kelunga menggunakan sumur gali Jumish kelunga menggunakan sumur gali Jumish kelunga menggunakan sumur pompa Alimish kelunga menggunakan menungan keramish Alimish kelunga menggunakan misungan keramish kelunga menggunakan menbung Alimish kelunga menggunakan menbung Alimish kelunga pang penganakan menbung Alimish kelunga pang menjuskan keman menganakan menungan kelungan menjuskan menganakan menungan kelungan menjuskan menjuskan menungan menjuskan menjuskan menganakan menungan kelungan penganakan menbung Alimish kelunga pang menganakan menjuskan menganakan menungan kelungan penganakan menjuskan menganakan menganakan menganakan meng	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB	0 orang
Jumlah pengguna metode vasektom 20 orang Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah 20 orang Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah 20 orang Jumlah pengguna netode KB obat tradisional 0 orang Jumlah pengguna kelender/KB Alamiah 130 orang Jumlah pengguna kelender/KB obat tradisional 130 orang Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB 130 orang F. Wabar Penyakit Deman berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini 3 kejadian Jumlah yang meninggal 0 kejadian Jumlah yang menjuduk Desa/Kelurahan 74,69 Tahun Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota 74,69 Tahun Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota 74,69 Tahun Angka harapan hidup Nesional 72,11Tahun Angka harapan mengunakan sumur gali 20 keluarga Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 20 keluarga Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 84 Keluarga Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 84 Keluarga Jumlah keluarga menggunakan peripaan air kran 0 Keluarga Jumlah keluarga menggunakan menungan air sungal 0 Keluarga Jumlah keluarga menggunakan matari air 0 Keluarga Jumlah keluarga yang menggunakan air sungal 0 Keluarga Jumlah keluarga yang menggunakan akase air minum dari air laut 0 Keluarga Jumlah keluarga yang menjakan makase air minum dari sunber di atas 0 Keluarga Jumlah keluarga yang menjakan memilik WC yang sehat 0 Keluarga Jumlah keluarga yang menggunakan memilik WC yang sehat 0 Keluarga Jumlah keluarga yang menggunakan memilik WC yang sehat 0 Keluarga Jumlah keluarga yang menggunakan memilik WC yang sehat 0 Keluarga Jumlah keluarga y	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	0 orang 316 orang
Jumlah pengguna metode Kentrasepsi tubekom 22 orang Jumlah pengguna metode KB chetardisinah 24 orang Jumlah pengguna metode KB chetardisional 0 orang Jumlah pengguna metode KB chetardisional 30 orang Jumlah pengguna metode KB chetardisional 30 orang Jumlah Pusyang tidak menggunakan metode KB 30 orang Jumlah Pusyang tidak menggunakan metode KB 30 orang F. Wabah Penyakit Pemamberdarah Jumlah selada dalam 1 tahun ini 3 skejadian Jumlah yang meninggal 3 skejadian Jumlah yang meninggal 4 skejadian Jumlah yang meninggal 5 skejadian Jumlah yang meninggal 7 skejadian 3 skejadian Jumlah yang meninggal 8 skejadian Jumlah yang skejadian 3 skejadian Jumlah yang skejadian 3 skejadian Jumlah keluarga menggunakan sumur gal 7 skejadian 3 skejadian Jumlah keluarga pelanggan PSM 0 skejadian Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 9 skejadian Jumlah keluarga menggunakan sumur penpa 8 strang skejadian 3 skejadian Jumlah keluarga menggunakan sumur penpa 8 strang 8 skejadian Jumlah keluarga menggunakan isi sungai 0 skeluarga Jumlah keluarga menggunakan menbung 1 skeluarga senggunakan menbung 1 skeluarga yang menggunakan misi sungai 1 skeluarga yang menggunakan makasi ai mum dari sunter di atas 0 skeluarga Jumlah keluarga yang didak mendapatkan akses air minum dari sunter di atas 0 skeluarga Jumlah keluarga yang didak mendapatkan akses air minum dari sunter di atas 0 skeluarga Jumlah keluarga yang didak mendapatkan akses air minum dari sunter di atas 0 skeluarga Jumlah keluarga yang menggunakan memilik Wo syang sehat 1 skeluarga shemilik Wo syang sehat 1 skeluarga sh	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	0 orang 316 orang 16 orang
Jumlah pengguna metode KB KelenderiKB Alamiah Jumlah pengguna metode KB KolenderiKB Alamiah Jumlah pengguna metode KB KolenderiKB alamiah Jumlah pengguna metode KB KolenderiKB 130 orang Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB 130 orang F. Wabah Penyakit Deman berdarah Jumlah Keladian dalam 1 tahun ini 3 kejadian Jumlah yang meninggal 0 kejadian Jumlah yang meninggal 74,69 Tahun Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan 74,69 Tahun Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota 74,69 Tahun Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota 74,69 Tahun Angka harapan hidup Nasional 73,93 Tahun F. Kabupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 200 Keluarga 3. Jumlah keluarga menggunakan sumur pali 0 Keluarga 3. Jumlah keluarga menggunakan sumur pana 841 Keluarga 4. Jumlah keluarga menggunakan peripasan air kran 0 Keluarga 5. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga menggunakan nidran umum 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga menggunakan nidran umum 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga menggunakan nidran umum 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga yang menggunakan midran umum 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga yang menggunakan midran umum dari sumber di atas 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga yang menggunakan midran umum dari sumber di atas 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga yang menggunakan midran umum dari sumber di atas 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga yang menggunakan midran umum dari sumber di atas 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga yang menggunakan midran midran umum 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga yang menggunakan midran midran umum 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga yang menggunakan midran midran midran umum 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga yang menggunakan midran midran midran umum 0 Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna kan metode KB Joo orang Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB ISO orang F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal O kejadian O kej	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metote xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB 130 orang F. Wabah Penyakit Deman berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal 6. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan Hidup Provinsi 74,69 Tahun Angka harapan Hidup Nasional 75,93 Tahun H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 3. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 8. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 8. Jumlah keluarga menggunakan idran umum 6. Jumlah keluarga menggunakan idran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan idran umum 8. Jumlah keluarga menggunakan idran umum 9. Keluarga 7. Jumlah keluarga menggunakan idran umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan idran umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan idran umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra idra umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra idra umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 10. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 10. Keluarga 10. Jumlah keluarga menggunakan meton idra idra umum 10. Keluarga menggunakan idra umum 10. Keluarga menggunakan idra umum 10. Keluarga menggunakan idra umum 10. K	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Deman berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah kejuarga menggunakan sumur pali Jumlah keluarga menggunakan sumur panya ini kunah keluarga menggunakan peripaan air kran Jumlah keluarga menggunakan sumur panya ini kran Jumlah keluarga menggunakan nidran umum Jumlah keluarga menggunakan midran umum Jumlah keluarga menggunakan mebung Jumlah keluarga menggunakan mengunakan mengu	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 22 orang
F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 lahun ini Jumlah kejadian dalam 1 lahun ini Jumlah yang meninggal O kejadian G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan hidup Pervinsi Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional To 3,93 Tahun H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampun Air Hujan 0 Keluarga 4. Jumlah keluarga menggunakan pengunakan pengunakan sumur pompa 841 Keluarga 6. Jumlah keluarga menggunakan peripaan air kran 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga menggunakan herinam umum 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga menggunakan mengunakan	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang
Deman berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jaksa harapan Hidup G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Besa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kebupaten/Kota Angka harapan Hidup penduduk Kebupaten/Kota Angka harapan Hidup penduduk Kebupaten/Kota Angka harapan Hidup Penduduk Rebupaten/Kota Angka harapan Hidup Penduduk Rebupaten/Kota Angka harapan Hidup Provinsi Angka Ha	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	0 orang 316 orang 16 orang 10 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang
Deman berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jaksa harapan Hidup G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Besa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kebupaten/Kota Angka harapan Hidup penduduk Kebupaten/Kota Angka harapan Hidup penduduk Kebupaten/Kota Angka harapan Hidup Penduduk Rebupaten/Kota Angka harapan Hidup Penduduk Rebupaten/Kota Angka harapan Hidup Provinsi Angka Ha	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	0 orang 316 orang 16 orang 10 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang
Deman berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jaksa harapan Hidup G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Besa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kebupaten/Kota Angka harapan Hidup penduduk Kebupaten/Kota Angka harapan Hidup penduduk Kebupaten/Kota Angka harapan Hidup Penduduk Rebupaten/Kota Angka harapan Hidup Penduduk Rebupaten/Kota Angka harapan Hidup Provinsi Angka Ha	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	0 orang 316 orang 16 orang 10 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang
Jumlah kyang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka Harapan Hidup Nasional 73,93 Tahun H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 200 Keluarga 2 Jumlah keluarga pelanggan PAM 3 Lyumlah keluarga menggunakan sumur pampa 3 Hiduarga pelanggan PAM 4 Jumlah keluarga menggunakan sumur pampa 3 Hi Keluarga 4 Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 4 Hiduarga Menggunakan peripanan ir kran 6 Keluarga 6 Jumlah keluarga menggunakan hari aurum 7 Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7 Jumlah keluarga menggunakan nidran umum 8 Keluarga 8 Jumlah keluarga menggunakan mata air 9 Keluarga 1 Meluarga menggunakan menbung 9 Jumlah keluarga menggunakan mata air 10 Jumlah keluarga yang menggunakan akses air minum dari sunber di atas 1 Meluarga 1 Meluarga yang didak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 9 Keluarga 1 Meluarga 1 Meluarga wenggunakan menbung 9 Keluarga 1 Meluarga yang didak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 9 Keluarga 1 Meluarga wenggunakan menbaran sumbaran on Keluarga 1 Meluarga yang didak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 9 Keluarga 1 Meluarga yang didak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 1 Meluarga 1 Meluarga wenggunakan wenggunakan menbaran sumbar di atas 1 Meluarga 1 Meluarga wenggunakan wenggunakan menbaran sumbar di atas 1 Meluarga wenggunakan wenggunakan menbaran sumbar di atas 1 Meluarga 1 Meluarga wenggunakan wenggunakan menbaran sumbaran dari sumbar di atas 2 Meluarga 3 Meluarga wenggunakan wenggunakan menbaran sumbaran sumbaran dari sumbar di atas 3 Meluarga 4 Meluarga wenggunakan wenggunakan sumbaran sumbara	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	0 orang 316 orang 16 orang 10 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan hidup Provinsi 72,11Tahun Angka harapan Hidup Provinsi 73,93 Tahun H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM 3. Jumlah keluarga pelanggan PAM 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 8. Jumlah keluarga menggunakan mata air 9. Jumlah keluarga menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 10. Jumlah keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Jumlah keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 16. Jumlah keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Jumlah keluarga 19. Jumlah keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Jumlah keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Keluarga 15. Jumlah keluarga 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga menggunakan mata air 18. Keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga meng	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan hidup Provinsi 74,69 Tahun Angka harapan Hidup Provinsi 72,11Tahun Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsian Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Angka harapan Halapan Angka harapan Halapan Ang	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 10 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan hidup Provinsi 74,69 Tahun Angka harapan Hidup Provinsi 72,11Tahun Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsian Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Angka harapan Halapan Angka harapan Halapan Ang	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 10 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan hidup Provinsi 74,69 Tahun Angka harapan Hidup Provinsi 72,11Tahun Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsian Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Angka harapan Halapan Angka harapan Halapan Ang	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 10 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan hidup Provinsi 74,69 Tahun Angka harapan Hidup Provinsi 72,11Tahun Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsian Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Halapan Halapan Angka harapan Halapan Angka harapan Halapan Angka harapan Halapan Ang	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 10 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota 74,69 Tahun 72,11Tahun 73,93 Tahun 72,93 Tahun 73,93 Tahun 73,93 Tahun 73,93 Tahun 73,93 Tahun 74,69 Tahun 74,69 Tahun 75,93 Tahun	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 10 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang
Angka Harapan Hidup Provinsi 72,11Tahun Angka harapan Hidup Nasional 73,93 Tahun H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 200 Keluarga 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM 0 Keluarga 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 0 Keluarga 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 841 Keluarga 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 0 Keluarga 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 0 Keluarga 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 0 Keluarga 8. Jumlah keluarga menggunakan embung 0 Keluarga 9. Jumlah keluarga menggunakan mata air 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 0 Keluarga 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal	0 orang 316 orang 118 orang 118 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 3 orang 130 orang
Angka harapan Hidup Nasional 73,93 Tahun H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan matu air 10. Jumlah keluarga menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 12. Herilaku hidup bersih dan sehat Kebiasaan buang air besar Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 10.21 Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	0 orang 316 orang 118 orang 118 orang 100 orang 2 orang 2 orang 2 orang 0 orang 0 orang 3 orang 0 orang 0 orang 0 orang 130 orang
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 5. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan is sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga menggunakan mata air 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 12. Keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 15. Keluarga 16. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 18. Keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Keluarga 13. Keluarga 14. Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB belender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 20 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 174,69 Tahun 74,69 Tahun
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 8.41 Keluarga 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 9. Jumlah keluarga menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 12. Jumlah keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 10. Jumlah keluarga 10. Jumlah keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Keluarga 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 2 orang 2 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 130 orang 74,69 Tahun 74,69 Tahun 72,11Tahun
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 8.41 Keluarga 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 9. Jumlah keluarga menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 12. Jumlah keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 10. Jumlah keluarga 10. Jumlah keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Keluarga 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 2 orang 2 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 130 orang 74,69 Tahun 74,69 Tahun 72,11Tahun
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 9. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 12. Jumlah keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 16. Jumlah keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Keluarga 19. Keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Keluarga 13. Keluarga 14. Keluarga 15. Jumlah keluarga 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 2 orang 2 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 130 orang 74,69 Tahun 74,69 Tahun 72,11Tahun
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 9. Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 9. Keluarga 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 12. Jumlah keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Keluarga 13. Keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 130 orang 3 kejadian 0 kejadian 74,69 Tahun 74,69 Tahun 72,11Tahun 73,93 Tahun
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 0 Keluarga 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 0 Keluarga 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 0 Keluarga 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 11. Jumlah keluarga 0 Keluarga 11. Jumlah keluarga 0 Keluarga 12. Jumlah keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga 16. Jumlah keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PuS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	0 orang 316 orang 118 orang 118 orang 100 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 131 orang 132 orang 133 orang 144,69 Tahun 154,69 Tahun 153,93 Tahun 200 Keluarga
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 12. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Perilaku hidup bersih dan sehat 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Keluarga 19. Keluarga 10. Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan Hidup Provinsi Angka Harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	0 orang 316 orang 118 orang 118 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 130 orang 130 orang 137 orang 138 kejadian 0 kejadian 74,69 Tahun 74,69 Tahun 77,11Tahun 73,93 Tahun 200 Keluarga
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 12. Jumlah keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Jumlah keluarga 16. Keluarga 17. Jumlah keluarga 18. Jumlah keluarga 19. Jumlah keluarga 10. Jumlah keluarga 10. Keluarga 11. Jumlah keluarga 10. Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 1310 orang 130 orang 130 orang 74,69 Tahun 74,69 Tahun 73,93 Tahun 200 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 0 Keluarga 8. Jumlah keluarga menggunakan embung 0 Keluarga 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 0 Keluarga 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 11. Jumlah keluarga 0 Keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Keluarga 13. Verilaku hidup bersih dan sehat 14. Kebiasaan buang air besar 15. Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 1021 Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode kSB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 130 orang 130 orang 74,69 Tahun 74,69 Tahun 77,11Tahun 73,93 Tahun 200 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga
8. Jumlah keluarga menggunakan embung 0 Keluarga 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 0 Keluarga 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 0 Keluarga 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 11. Jumlah keluarga 0 Keluarga 11. Jumlah keluarga 12. Terilaku hidup bersih dan sehat 13. Kebiasaan buang air besar 14. Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 1021 Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode vasektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	0 orang 316 orang 118 orang 118 orang 100 orang 22 orang 22 orang 0 orang 0 orang 3 kejadian 0 kejadian 74,69 Tahun 77,393 Tahun 200 Keluarga 0 Keluarga 841 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 12. Jumlah keluarga 13. Jumlah keluarga 14. Jumlah keluarga 15. Perilaku hidup bersih dan sehat 16. Kebiasaan buang air besar 17. Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 18. Perilaku hidup bersih dan sehat 19. Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 19. Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan Hidup Provinsi Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0 orang 316 orang 116 orang 118 orang 1100 orang 0 orang 22 orang 22 orang 0 orang 0 orang 3 kejadian 0 kejadian 74,69 Tahun 74,69 Tahun 72,11Tahun 73,93 Tahun 200 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 0 Keluarga 0 Keluarga 1. Perilaku hidup bersih dan sehat Kebiasaan buang air besar Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 1021 Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 5. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 6. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 7. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 130 orang 130 orang 3 kejadian 74,69 Tahun 74,69 Tahun 73,93 Tahun 200 Keluarga 0 Keluarga
Total jumlah keluarga 0 Keluarga I. Perilaku hidup bersih dan sehat Kebiasaan buang air besar Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 1021 Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode kxx Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode kxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 3. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan pirsungai 8. Jumlah keluarga menggunakan embung 8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 orang 316 orang 116 orang 118 orang 1100 orang 0 orang 22 orang 22 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 3 kejadian 0 kejadian 74,69 Tahun 77,11Tahun 73,93 Tahun 200 Keluarga 0 Keluarga
I. Perilaku hidup bersih dan sehat Kebiasaan buang air besar Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 1021 Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi siral Jumlah pengguna metode kontrasepsi piral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan hidup penduduk Rabupaten/Kota Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan hidup pengunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 3. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 4. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 5. Jumlah keluarga menggunakan nidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan mata air 9. Jumlah keluarga menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 10 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 130 orang 130 orang 130 orang 130 orang 1 o
Kebiasaan buang air besar Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 1021 Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi sipiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah pengguna tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 5. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 130 orang 3 kejadian 74,69 Tahun 74,69 Tahun 77,11Tahun 73,93 Tahun 200 Keluarga 0 Keluarga
Kebiasaan buang air besar Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 1021 Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi sipiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah pengguna tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 5. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 130 orang 3 kejadian 74,69 Tahun 74,69 Tahun 77,11Tahun 73,93 Tahun 200 Keluarga 0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat 1021 Keluarga	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi sipiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah pengguna tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 5. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 130 orang 3 kejadian 6 kejadian 74,69 Tahun 77,11Tahun 73,93 Tahun 200 Keluarga 0 Keluarga
	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 6. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan nerpunakan ir kran 6. Jumlah keluarga menggunakan air sungai 8. Jumlah keluarga menggunakan midran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan menbung 9. Jumlah keluarga menggunakan mata air 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga 12. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 10. Jumlah keluarga 11. Perilaku hidup bersih dan sehat	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 22 orang 24 orang 0 orang 0 orang 130 orang 130 orang 130 orang 3 kejadian 6 kejadian 74,69 Tahun 77,11Tahun 73,93 Tahun 200 Keluarga 0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan 1021 Keluarga	Keluarga Berencana Jumilah akseptor KB Jumilah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumilah pengguna metode kontrasepsi spiral Jumilah pengguna metode kontrasepsi piral Jumilah pengguna metode kontrasepsi pil Jumilah pengguna metode kontrasepsi pil Jumilah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumilah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumilah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumilah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumilah pengguna metode KB obat tradisional Jumilah pengguna alat kontrasepsi metode xxx Jumilah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumilah kejadian dalam 1 tahun ini Jumilah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Babupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan hidup Provinsi Angka harapan hidup Posional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumilah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumilah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumilah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumilah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumilah keluarga menggunakan metopa air kran 6. Jumilah keluarga yang menggunakan mata air 10. Jumilah keluarga yang menggunakan mata air 11. Jumilah keluarga yang menggunakan mata air 12. Jumilah keluarga yang menggunakan mata air 13. Jumilah keluarga yang menggunakan akses air minum dari sumber di atas 14. Jumilah keluarga yang menggunakan akses air minum dari sumber di atas 15. Jumilah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas 15. Jumilah keluarga yang tidak mendapatkan akses air	0 orang 316 orang 16 orang 18 orang 100 orang 0 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 kejadian 0 orang 130 orang 3 kejadian 74,69 Tahun 77,69 Tahun 77,11Tahun 73,93 Tahun 200 Keluarga 0 Keluarga
	Keluarga Berencana Jumlah akseptor KB Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik Jumlah pengguna metode kontrasepsi siondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi kondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi tondom Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah Jumlah pengguna metode KB obat tradisional Jumlah pengguna atlat kontrasepsi metode xxx Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB F. Wabah Penyakit Demam berdarah Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum 7. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga menggunakan embung 9. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas Total jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	0 orang 316 orang 16 orang 170 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 130 orang 14,69 Tahun 15,69 Tahun 16,89 Tahun 172,11Tahun 173,93 Tahun 173,93 Tahun 174,69 Tahun 175,93 Tahun 175,93 Tahun 176,89 Tahun 177,93 Tahun 178,93 Tahun 179,93 Tahun 179,93 Tahun 170,93 Tahu

Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan		20 Keluarga			
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum		0 Keluarga			
Pola makan					
biasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali Tidak					
biasaan penduduk makan sehari 2 kali Tidak					
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali		Ada			
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali Ada					
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali Tidak					
Kebiasaan berobat bila sakit Dukun Terlatih		Tidak ada			
Dukun Tenatin Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu		Tidak ada			
		Banyak Tidak ada			
Dbat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Tidak ada Paranormal Tidak ada					
Obat tradisional dari keluarga sendiri Sedikit					
Tidak diobati		Tidak ada			
J. Status Gizi Balita					
Jumlah Balita		207 orang			
Jumlah Balita bergizi buruk		0 orang			
Jumlah Balita bergizi baik		207 orang			
Jumlah Balita bergizi kurang		0 orang			
Jumlah Balita bergizi lebih		3 orang			
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini			4-		Di
Jenis penyakit	2 0505	Jumlah penderi		Dumat	Di rawat di
Kanker Diabetes Melitus	2 orang 50 orang			Rumar Puskes	
Gila/stress	8 orang			Rumah	
Asma	8 orang			Puskes	
	,iy			351101	
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat					
Jumlah MCK Umum			0 unit		
Jumlah Posyandu			4 unit		
Jumlah kader Posyandu aktif			25 orang		
Jumlah pembina Posyandu			1 orang		
Jumlah Dasawisma			20 Dasawisma		
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif			20 orang		
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif			8 orang 4 orang		
Buku rencana kegiatan Posyandu			Diisi		
Buku data pengunjung Posyandu			Diisi		
Buku kegiatan pelayanan Posyandu			Diisi		
Buku administrasi Posyandu lainnya			2 jenis		
Jumlah kegiatan Posyandu			2 jenis		
Jumlah kader kesehatan lainnya			0 orang		
Jumlah kegiatan pengobatan gratis			0 jenis		
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN			1 jenis		
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan			4 jenis		
Lainnya			2 jenis		
X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
A. REALITATORI DATE REPORT					
A. Konflik SARA					
Kasus konflik pada tahun ini					0 kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini					0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga					0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW					0 kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	rokot deed t	oog/kolurahan lain			0 kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masya Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	ıakat üäfi de	coa/NCIUI di idil i idili			0 kasus
Jumlah kontilik antara masyarakat dengan pemerintah Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah					Rp 0,00
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah			0 orang		
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan			0 orang		
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan		_	0 orang		
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah					0 orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik			0 kasus		
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik				0 orang	
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik				_	Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara					0 buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara				_	0 rumah
	Jumlah korban luka akibat konflik Sara			_	0 orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara Jumlah janda akibat konflik Sara				0 orang	
Jumian janda akidat konflik Sara Jumlah anak yatim akidat konflik Sara		_	0 orang		
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum					0 orang
·					
B. Perkelahian					'
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini					0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa					0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah					0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material					0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum					0 orang
C. Pencurian					
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini					0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat					0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat				0 kasus	

Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	
, ,	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah	I
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya	0 kasus
Juliilari kasus penjarani dan penjerobotan tanan yang kolban bukan penduduk setempat terapi penakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	'
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	0 orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	0 orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	0 orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba	
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	0 buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	0 orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	0 kasus
Jumlah pengedar Narkoba	0 orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang 3 orang
ournam polana manoba yang alaum alau diploses secala manum	o orang
G. Prostitusi	
Umlah penduduk pekerja pramu nikmat	0 orang
Lokalisasi prostitusi	Tidak Ada
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kali
H. Pembunuhan	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus bunuh diri	0 kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 kasus
I. Penculikan Jumlah kasus penculikan	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
J. Kejahatan seksual	-
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	0 kasus 0 unit
Juliian tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	O driit
K. Masalah Kesejahteraan Sosial	
n. Wasalah resejahteraan sosiai	
	0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan	0 orang 0 orang
Jumlah gelandangan	
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar	0 orang 0 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo	0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panta singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah nank jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni lanti dan taman kota Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah nank jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah pumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni binggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anagota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni bilar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah janda Jumlah duda	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 5 orang 7 orang 9 orang
Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjitu tsia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni jira di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0 – 18 tahun Jumlah anak yatim usia 0 – 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 – 18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0 – 18 tahun Jumlah anak yatim piatu nelanga pengangguran	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 5 orang 7 orang 9 orang 9 orang
Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti suhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jiar hijau dan taman kota Jumlah penghuni jiar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah penghuni iliar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah janda Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 5 orang 7 orang 9 orang 9 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah ananusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gacat fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni ilar di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anagota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah janda Jumlah duda Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 5 orang 7 orang 0 orang 90 orang 0 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gala/stress/cacat mental Jumlah orang gala/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jingiran rel kereta api Jumlah penghuni jingiran rel kereta api Jumlah penghuni jingiran rel kereta api Jumlah penghuni jiar di lahan dan fasilitas umur lainnya Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah janda Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak usia 7–12 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 13-18 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 5 orang 7 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gacaet fisik Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni jian tari ali ahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SI/P/sederajat Jumlah anak vang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 15 orang 7 orang 90 orang 90 orang 15 orang 10 orang 10 orang 11 orang 115 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang gala/stress/cacat mental Jumlah orang gala/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah rumah singgah anak jalanan Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jingiran rel kereta api Jumlah penghuni jingiran rel kereta api Jumlah penghuni jingiran rel kereta api Jumlah penghuni jiar di lahan dan fasilitas umur lainnya Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah janda Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran Jumlah anak usia 7–12 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 13-18 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 5 orang 7 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah anak jalanan dan tertantar Jumlah manusia tanjut usia terlantar Jumlah manusia tanjut usia terlantar Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang kelainan kulit Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah pumlah jompo Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah panti asuhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni jinggiran rel kereta api Jumlah penghuni jalur di lahan dan fasilitas umum lainnya Jumlah angota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak syatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak syatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak syatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak sian 7-12 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia naya menjadi kepala keluarga	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 1 orang 0 orang 5 orang 7 orang 9 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 3 orang 4 orang 4 orang 4 orang
Jumlah pegemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah nanak jalanan dan terlantar Jumlah nanak jalanan dan terlantar Jumlah nanak jalanan dan terlantar Jumlah narag jila/siress/cacat mental Jumlah orang gila/siress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik Jumlah orang vang idur di kolong jembatan/emperan Jumlah orang vang idur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti sauhan anak Jumlah panti sauhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni bantaran sungai Jumlah penghuni jenggiran rel kereta api Jumlah penghuni jungiran rel kereta api Jumlah nangota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak vatim piatu 0–18 tahun yang tidak sekolah di SI/T/sederajat Jumlah anak vatim piatu 0–18 tahun yang tidak sekolah di SI/T/sederajat Jumlah anak vang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang Jumlah penduduk kes NAPI Jumlah penduduk kes NAPI Jumlah penduduk kes NAPI	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 7 orang 0 orang 0 orang 0 orang 15 orang 0 orang
Jumlah gelandangan Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah manusia lanjut usia terlantar Jumlah orang delainan kult Jumlah orang kelainan kult Jumlah orang kelainan kult Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah panti jompo Jumlah penghuri jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuri lantaran sungai Jumlah penghuri lantaran sungai Jumlah angkota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak, yatim piatu 0–18 tahun Jumlah anak, semaja, preman dan pengangguran Jumlah anak, usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak vang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang Jumlah penduduk kinggal di daerah rawan bencana taynam bercana tunami	0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 2 orang 3 orang 5 orang 7 orang 9 orang 0 orang 1 orang 1 orang 0 orang
Jumlah pengemis jalanan Jumlah pengemis jalanan Jumlah nanak jalanan dan terlantar Jumlah nanak jalanan dan terlantar Jumlah naran giakstess/cacat mental Jumlah orang giakstess/cacat mental Jumlah orang gacat fisik Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan Jumlah paran dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti jompo Jumlah panti sauhan anak Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota Jumlah penghuni laran sungai Jumlah penghuni laran rel kereta api Jumlah penghuni jinggiran rel kereta api Jumlah penghuni jangiran rel kereta api Jumlah angota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif Jumlah anak yatim usia 0-18 tahun Jumlah anak yatim usia 0-18 tahun Jumlah anak yatim usia 0-18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0-18 tahun Jumlah anak yatim piatu 0-18 tahun Jumlah anak yatim yatia usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat Jumlah anak yang bekerja membantuk eluarga menghasilkan uang Jumlah penduduk eks NAP Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 8 orang 1 orang 2 orang 0 orang 0 orang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 7 orang 0 orang 0 orang 0 orang 15 orang 0 orang

	lumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan		
intering personals from greater and sections of the section of the personal and sectio	Journal Politican inggar ar adoran rawan bonoana kokokonnyan		0 orang
	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor		0 orang
Lender producial to special of depends are an a foreign in the relation of the	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan		0 orang
Lender producial to special of depends are an a foreign in the relation of the	Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan		0 orang
until a broads a regard to horsette regard formed old of the human of the risk may garbeid any old horsette between presented (1 compared to the present of the present to the present of	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih		0 orang
unter his protection from grant to treatment and protection (i.e. the protection of	Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus		
Linch and generating processing young places and group processes. K. Aderson Dallam Russian Rusgia K. Aderson Dallam Russian Rusgia K. Aderson Dallam Russian Rusgia K. Aderson Dallam Russian Russian Russian K. Aderson Dallam Ru	1 00		
Treatment of the comment of the comm			
Content Cont			
Lumin Nations Actionates abeliant or only the Principal Control of Princ	duman warya penuarang uan atau pekerja musiman		orung
Lumin Nations Actionates abeliant or only the Principal Control of Princ			
Junish Asses Jakes and Bit Jerhation stears The Trust Manual Societies And Section State (1998)			I
Junish Assa Jelemener comp to all include productions of the production of the produ			
Justice Nation Accordance and Controlley owing tax in units in accordance and position for the product of the p	·		
A facer dan interminates 1. Taren' dan interminates 1. T	· · ·		-
To record on intrinsidad con class for an algorital molygoridad out plitals dissent data on its burnal intrinsidad on class for an algorital molygoridad out plitals dissent data data intrinsical conscious control and assessment of the control of	Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua		0 kasus
users invested for able tree register management and prive date may be a common to the	Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya		0 kasus
users invested for able tree register management and prive date may be a common to the			
James infinitioned can able into an agout meregenetal of pilmis face does also leveraren (michi hassa dictional poly does allow support policif for dis not account units in controllar policy to traverse young tepida of does don't be barrien in which in the control in the control of the cont	M. Teror dan Intimidasi		
James infinitioned can able into an agout meregenetal of pilmis face does also leveraren (michi hassa dictional poly does allow support policif for dis not account units in controllar policy to traverse young tepida of does don't be barrien in which in the control in the control of the cont	Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan		0 kasus
Justice has seewbern geleg det nie van greek perial fer oor de in comman untuk merkenburken heekstulen penduduk. Assay			0 kasus
Jurian has been fortime yearly lefted of deep dar helvahan halba mile mile mile has halband in promisens in sharing katery to know promisens in sharing katery to make year and the second part of mayor halban halband halban			
unan hasan hasahan dan pemidasan helendak ketorapa ketora			
Jumph Pergenesan Kasan Kamanan Lingkungan Senesta 1 Pelenbagaan Sistem Kamanan Lingkungan Senesta 1 Pelenbagaan Sistem Kamanan Lingkungan Senesta 1 Pelenbagaan Sistem Kamanan Lingkungan Senesta 1 Ada Ada 1 Janganian Sistem Kamanan Lingkungan Senesta 1 Jangan	, , ,		
Referenbagsan Sistem Keamanan Lingbungan Semesta Jegennas Bristhannan (Spil dan Perficiaryon Masyarakat Ana Jegennas Bristhannan (Spil dan Perficiaryon Masyarakat Jegennas Bristhannan (Spil dan Perficiaryon Masyarakat Jegennas Bristhannan (Spil dan Perficiaryon dan Kabedurah Jegennas Bristhannan (Spil dan Perficiaryon dan Bristhannan (Spil dan			
Aca Implementaries obligation per	, , among a managaman an magaman		
Aca Implementaries obligation per	N. Delante and Older Konney Understand		<u> </u>
Name Parthelium Student Parthelium Parthelium Student Parthelium Student Parthelium Student Parthelium Student Parthelium Student Parthelium Parthelium Student Parthelium			I
Lumb H 7 data schutura kinnya yang ada Sistaming Poe Ronda with a nagola Heritag birah Lumias sudori kingatan Sistaming dan Poe Ronda Ada sudori kingatan Sistaming dan Poe Ronda sudori kingatan Sistaming dan Poe Ronda sudori kingatan Sistaming dan Poe Ronda sudori kingatan Sistaming dan Poeranga dan RosteeLusih suniah bersiniaan Sistaming dan Poeranga dan RosteeLusih suniah Poeranga birida Cherakhariaan K. Kasadaran berpamerintahan, berbangsa dan bernegara seria birida bersiniaan Sistaming dan Sistaming dan RosteeLusih seria birida bersiniaan Sistaming dan Sis	<u> </u>		
unitah neggaba Haraka (dan Limmas dakaba kepidan Silambirah (dan Inmas intuka neggaba Haraka Pengamanin (SATPAM) sesata Liuku anggaba Haraka (Pan Inmas intuha herenga Salambirah Pengamanin (SATPAM) sesata Liuku anggaba Induk DesahKulurahan Liuriah Pos Jaga Induk DesahKulurahan Liuriah Liuri			
adeal logistar Sistaming dar Pois Ronda Luman angust Arlanga dar Luman Luman Angustar Sistaming dar Poinganam (RATPAM) eseatal Luman Angustar Sistamin Pengamanam Angustar Sistamin Pengamanam Luman Angustar Sistamin Pengamanam Angustar Sistamin Angustar Sistamin Pengamanam Angustar Pengamanam Pengaman Pengamanam Angustar Pengamanam			
Is keep Agent Programmer (AFTPAM) severals Irrinarh Internative Standarding pelot Pengarusa dan Kadesil Jurah Irrinarh Pengarian Michael Pengarianan (AFTPAM) severals Is KEBAULATAN POLITIK MASYARAKAT IS KEBAULATAN POLITIK MASYARAKATAN IS KEBAULATAN POLITIK MASYARAKATAN IS KEBAULATAN POLITIK MASYARAKATAN	Jumlah anggota Hansip dan Linmas		
untils heoripeck Satura Pengananan (SATPAM) sevetal ministra pembranas Saturana den Audes (until him him for Juga Induk Desarkhariana den Audes (until him for Juga Induk Desarkhariana den bernegara eties kegitana pemartenjan rilat lebelogi Paracasila sebagai Dasar Negara 0 jenis eties kegitana pemartenjan rilat lebelogi Paracasila sebagai Dasar Negara 0 jenis eties kegitana pemartenjan rilat lebelogi Paracasila sebagai Dasar Negara 0 jenis eties kegitana pemartenjan rilat lebelogi Paracasila sebagai Dasar Negara 0 jenis eties kegitana pemartenjan rilat lebelogi Paracasila sebagai Dasar Negara 0 jenis eties kegitana pemartenjan rilat lebelogi Paracasila sebagai Dasar Negara 0 jenis eties kegitana pemartenjan rilat lebelogi Paracasila sebagai Dasar Negara 0 jenis eties kegitana pemartenjan rilat lebelogi pama kegitana pemartenjan rilat pama kegitana pemartenjan rilat pama kegitana pemartenjan rilat lebelogi pama kegitana pemartenjan kegitana pemartenjan rilat lebelogi pama kegitana pemartenjan rilat pama kegitana pemartenjan kegitana	Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda		
unitals Possibanian (solici Penginus dan Kadek-Lurah unitals Possiban Hudiah Possiban (beas-Kelurahan unitals Possiban Hudiah Hud	Buku anggota Hansip dan Linmas		1 jenis
II. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT II. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT II. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT III. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKATAN III. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKATANAN III. KEDAULATANAN POLITIK MASYARAKATANAN POLITIK MASYARAK	Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta		5 unit
KERDAULTAN POLITIK MASYARAKAT 1. KERDAULTAN POLITIK MASYARAKATAT 1. KERDAULTAN POLITIK MASYARAKATATAN POLITIK	Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah		1 kegiatan
KERDAULTAN POLITIK MASYARAKAT 1. KERDAULTAN POLITIK MASYARAKATAT 1. KERDAULTAN POLITIK MASYARAKATATAN POLITIK	Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan		5 Pos
Keadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara erini kegilatan permantapan nilai ideologi Parcasalia sebagai Dasar Negara 0 yenis muliah kegilatan permantapan nilai ideologi Pancasalia sebagai Dasar Negara 0 yenis muliah kegilatan permantapan nilai Shrineka Tunggai Ika 0 Jenis muliah Kegilatan permantapan nilai Shrineka Tunggai Ika 0 Jenis muliah Kegilatan permantapan nilai Shrineka Tunggai Ika 0 Jenis 0 Jen			
Keadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara erini kegilatan permantapan nilai ideologi Parcasalia sebagai Dasar Negara 0 yenis muliah kegilatan permantapan nilai ideologi Pancasalia sebagai Dasar Negara 0 yenis muliah kegilatan permantapan nilai Shrineka Tunggai Ika 0 Jenis muliah Kegilatan permantapan nilai Shrineka Tunggai Ika 0 Jenis muliah Kegilatan permantapan nilai Shrineka Tunggai Ika 0 Jenis 0 Jen			I
Keadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara erini kegilatan permantapan nilai ideologi Parcasalia sebagai Dasar Negara 0 yenis muliah kegilatan permantapan nilai ideologi Pancasalia sebagai Dasar Negara 0 yenis muliah kegilatan permantapan nilai Shrineka Tunggai Ika 0 Jenis muliah Kegilatan permantapan nilai Shrineka Tunggai Ika 0 Jenis muliah Kegilatan permantapan nilai Shrineka Tunggai Ika 0 Jenis 0 Jen	XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT		
eine kegiatan pernantapan nial feboogi Paracasila sebagai Dasan Negara milari kegiatan pernantapan nial fishende Turngai ka milari kegiatan pernantapan nial Shinneka Turngai ka keniak kegiatan pernantapan nial Shinneka Turngai ka milari kasus wanga desakutuhahan yang minta suskalari ke luar negari milari kasus wanga desakutuhahan yang minta suskalari ke luar negari milari kasus wanga desakutuhahan yang minta suskalari ke luar negari milari kasus wanga desakutuhahan yang minta suskalari ke luar negari milari kasus wanga desakutuhahan yang minta suskalari ke luar negari milari kasus wanga desakutuhahan yang minta suskalari ke luar negari milari kasus wanga indelakutuhahan pengara letanga secara resmi Nasus milari kasus wanga desakutuhahan yang minta suskalari ke luar negari milari kasus wanga desakutuhahan yang minta suskalari ke luar negari milari kasus wanga desakutuhahan yang minta suskalari ke luar negari milari kasus wanga disakitakakan mengara tengaga cera resmi Nasus milari kasus kejahatan pernanta dan milari masparakat dan kebangai kebangai kada dasakebutuhahan perbabasan negara tengagai kanga dan pentapakan			
Luriah kegiatan pemantapan nial Isdoog Pencasali sebagai Dasar Negeria (ceris-peins kegiatan pemantapan nial Isdoog Pencasali sebagai Dasar Negeria (ceris-peins kegiatan pemantapan nial Bihnineka Tunggal Ika (ceris-peins kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya (ceris-kegiatan pemantapan pemantapan negara tetangga (ceris-kegiatan pemantapan) (ceris-kegiatan pemantapan negara tetangga kesatuan pemantapan negara tetangga (ceris-kegiatan pemantapan pemantapan pemantapan kesatuan pemantapan pemantap	A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara		
iente-jenis kegiatan permantapan nial Bhinneka Tinggal Ika miniah kegiatan permantapan nial Bhinneka Tinggal Ika o O kegiatan miniah kegiatan permantapan nian Bhinneka Tinggal Ika o O kegiatan miniah kegiatan permantapan kesatuan bangsa lainnya umiha kegiatan permantapan kesatuan bangsa lainnya umiha kausu warga desakelurahan yang minis suakaflari ke luar negeri Umiha wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara resmi O orang umiha wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tetar resmi Umiha wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tetar resmi Umiha wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tetar resmi Umiha kausu pertupun atau perkuman antar kelompok pengacau kamanan di perbatasan negara dengan wangalaparat dari esakekutuhan terhadap fasilitasi wangan mengangan kelalaha dari desakekurahan negara tetangga Umiha wanga yang disaksifikakikan mengangan kelangga langarat dari esakekutuhan terhadap fasilitasi wangan perpangan kelalahan Mengaratakan desakekurahan perbatasan negara tetangga Umiha kasu kelahatan pencaratan, penjarahan, perampokan matari angara kelangan ke	Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 jenis	
iente-jenis kegiatan permantapan nial Bhinneka Tinggal Ika miniah kegiatan permantapan nial Bhinneka Tinggal Ika o O kegiatan miniah kegiatan permantapan nian Bhinneka Tinggal Ika o O kegiatan miniah kegiatan permantapan kesatuan bangsa lainnya umiha kegiatan permantapan kesatuan bangsa lainnya umiha kausu warga desakelurahan yang minis suakaflari ke luar negeri Umiha wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara resmi O orang umiha wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tetar resmi Umiha wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tetar resmi Umiha wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tetar resmi Umiha kausu pertupun atau perkuman antar kelompok pengacau kamanan di perbatasan negara dengan wangalaparat dari esakekutuhan terhadap fasilitasi wangan mengangan kelalaha dari desakekurahan negara tetangga Umiha wanga yang disaksifikakikan mengangan kelangga langarat dari esakekutuhan terhadap fasilitasi wangan perpangan kelalahan Mengaratakan desakekurahan perbatasan negara tetangga Umiha kasu kelahatan pencaratan, penjarahan, perampokan matari angara kelangan ke		0 kegiatan	
umlah kogulan pemantapan kesatuan bangsa lainnya menia kegalatan pemantapan pelantah bangsa lainnya meniah kagawa sang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi umlah waraya yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi umlah waraya yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi umlah waraya yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara tidak resmi umlah waraya yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara tidak resmi umlah waraya yang melintasi perbatasan ke negara tetangga kerangan terbatasan negara tetangga umlah kasus pertempuran atau pertewanan antar kelompok pengacau di desakelurahan perbatasan negara tetangga umlah kasus pertempuran atau pertewanan antar kelompok pengacau di desakelurahan perbatasan antarangan umlah waraya pang diklasifikasikan mercongrong keutuhan NRFI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desakelurahan perbatasan antarangan umlah kasus pertempaken perbatasan pang telipah bang yang telipah bang kerang telipah b		0 jenis	
ienis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya untah kasus wanga desaketurahan yang minta suakafan ke luar negeri untah kasus wanga desaketurahan yang minta suakafan ke luar negeri untah wanga yang meintasi perbatasan he negara tetangga secara resmi 0 orang untah wanga yang meintasi perbatasan negara tetangga secara takar resmi 0 orang untah wanga yang meintasi perbatasan negara tetangga secara takar resmi 0 kasus untah kasus yang diklasifikasian merongrong keuthan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desakelurahan negara tetangga 0 kasus untah kasus yang diklasifikasian merongrong keuthan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desakelurahan negara tetangga 0 kasus untah kasus yang diklasifikasian merongrong keuthan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desakelurahan tahun ni untah kerangakajan di perbatasan antar negara yang tejadi dahun ini untah kasus yang diklasifikasian merongrong keuthan keuthan materi lainnya kakata senganke kerangake kerangake dipan di perbatasan antar negara yang tejadi dahun ini untah kasus kenjadasi pencurian, pengahah, perampokan dan intimdiasi areta teror yang terjadi di desakelurahan perbatasan antar negara yang tejadi dasakahurahan ni untah kasus yang mengarak kepada tindakan disaketigara dapaken kecamatan mapun antar kecamatan, antar kabupatentikah untah kasus yang mengarak kepada tindakan disaketigara bangsa dan pengingkaran NKRI, Paracalis, UU 1945 dan Bhinoka Tunggal Ika untah kasus yang mengarak kepada tindakan disaketigara bangsa dan pengingkaran NKRI, Paracalis, UU 1945 dan Bhinoka Tunggal Ika untah kasus yang mengarak kepada tindakan disaketigara bangsa dan pengingkaran NKRI, Paracalis, UU 1945 dan Bhinoka Tunggal Ika untah kasus yang mengarak kepada tindakan disaketigara bangsa dan pengingkaran NKRI, Paracalis, UU 1945 dan Bhinoka Tunggal Ika untah kasus yang mengarak kepada tindakan disaketigara bangsa dan pengingkaran NKRI, Paracalis, UU 1945 dan Bhinoka Tunggal Ika untah kasus yang mengarak kepada pengungkan pengungkan pengungkan pengungkan p			
unish kasus warga yang melintasi perbatasan kengara letangga seciar a resmi umish wanga yang melintasi perbatasan kengara tetangga seciar a resmi umish wanga yang melintasi perbatasan kengara tetangga seciar a resmi umish wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga seciar disk resmi umish wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga seciar disk resmi umish wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga seciar disk resmi umish wanga yang melintasi perbatasan negara tetangga seciar disk resmi umish wanga yang distalikasikan merongrong koutuhan NKRI dian Kesatuan Bangga Indonesia di desarkelurahan negara tetangga umish kasus yang distalikasikan merongrong koutuhan NKRI dian Kesatuan Bangga Indonesia di desarkelurahan tahun iri umish kasus kepitatan pencurutan, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta terory vang terjadi di desarkelurahan perbatasan antar negara umish masalik kebangjakengan di pendasan antar negara yang terjadi bankelurahan iri umish kasus kepitatan pencurutan, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta terory vang terjadi di desarkelurahan perbatasan antar negara yang terjadi dasakelurahan iri umish kasus kepitatan pencurutan, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta terory vang terjadi di desarkelurahan perbatasan antar negara yang terjadi dasakelurahan dian kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupatern/kola umish kasus senjarah kepada tindakan distintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhimeka Tunggal Ikia umish kasus yang mengarah kepada tindakan distintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhimeka Tunggal Ikia umish kasus penangkapan nelayan saing di wilayah peraran dasakelurahan umish kasus penangkapan nelayan saing di wilayah peraran dasakelurahan umish kasus penangkapan nelayan saing di wilayah peraran dasakelurahan umish kasus penangkapan nelayan saing di wilayah peraran dasakelurahan umish kasus penangkapan nelayan saing di wilayah peraran desakelurahan umish kasus penangkapan nelayan saing di wilayah peraran dasakeluraha			
Jumiah kasus warga desakoturahan yang mintas sakakani ke lugar negari mumiah warga yang melintasi perbatasan he negara tetangga secara resmi 0 orang Jumiah warga yang melintasi perbatasan he negara tetangga secara fidak resmi Jumiah warga yang melintasi perbatasan herapara tetangga secara fidak resmi Jumiah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara fidak resmi Jumiah kasus perdaparan atau prempuran antau prempuran atau prempuran antau prempuran atau prempuran antau prempuran atau prempuran atau prempuran atau prempuran antau prempuran antau negara yang disporkan Kepata Desaiturah kepata besaiturah atau prempuran kepata terbaga prempuran kepata beraiturah desaik-burahan diperaiturah diperaiturah diperaiturah desaik-burahan diperaiturah diperaiturah diperaiturah prempuran prempuran prempuran prempuran prempuran prempuran prempuran prempur			
umlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi 0 orang umlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi 0 orang umlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi 0 orang umlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari 0 kasus umlah serangan terhadag fasilitas umum dan milik masyarakat olah kelompok pengacau di desakelurahanan perbatasan negara tetangga umlah kasus pertempuran atau perlawanan AIKRI dan kesatuan Bangsa hidnorahan perbatasan antar nemorgnog keutuhan NKRI dan kesatuan Bangsa hidnorahan perbatasan antar nemorgnog keutuhan NKRI dan kesatuan Bangsa hidnorahan perbatasan antar nemorgnog keutuhan NKRI dan kesatuan Bangsa hidnorahan perbatasan antar nemorgnog keutuhan NKRI dan kesatuan Bangsa hidnorahan perbatasan antar nemorgnog keutuhan NKRI dan kesatuan Bangsa hidnorahan perbatasan antar nemorgnog keutuhan NKRI dan kesatuan Bangsa hidnorahan tahu perbatasan antar			
lumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak keemi umlah kasus pertampuran atau pertawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari 0 kasus lesan/kelurahan umlah serangan terhadap fissilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desan/kelurahan perbatasan negara tetangga 0 kasus lumlah kasus yang dikasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desan/kelurahan perbatasan negara tetangga 0 kasus lumlah kasus yang dikasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desan/kelurahan tahun ini 0 kasus lumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini 0 kasus lumlah sengikata pencuran, penjarahan, perampakan serat teror yang terjadi di desan/kelurahan antar negara yang diaparat berangkan pencuran, pang terjadi desan/kelurahan ini 0 kasus lumlah sengketa perbatasan yang terjadi desan/kelurahan ini 0 kasus lumlah kasus yang terkati dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desauturah ke pemerinah tingkat atasnya 0 kasus lumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal ika ang dissalisat penyekesalinnya oleh Kepala Desauturah ke pemerinah tingkat atasnya 0 kasus lumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal ika unlah kasus penangkapan nelayan sebagai kewenangan desan/kelurahan 1 pengarangkapan nelayan pengarah pengar	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
umlah kasus partempuran alaku perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbahasan negara dengan wargaripan herhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desakelurahan perbahasan nengara tetangga umlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desakelurahan perbahasan nengara tetangga umlah korban manusia baiki luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan O kasus umlah kosau kelahengakerjaan di perbahasan antar negara yang terjadi shuh iri Umlah sasalak helahengakerjaan di perbahasan antar negara yang terjadi shuh iri Umlah kasus kelahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimdasi serta teror yang terjadi di desakelurahan perbahasan antar negara yang terjadi dakan terbahasan antar negara yang terjadi dakan kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kebupaten/kota an desakelurahan antar provinsi. Umlah kasus sengketa perbahasan antar negara yang terjadi baik antar desakelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kebupaten/kota an desakelurahan antar provinsi. Umlah kasus yang terkait dengan perbahasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desak-urah kepamerintah tingkat atasanya Umlah kasus yang terkait dengan perbahasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desak-urah kepamerintah tingkat atasanya Umlah kasus yang nengarah kepaban antar negara bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika ang disakitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desak-urahan desakelurahan Umlah kasus penangkapan nelalyan nelalyan asing di wilayah perairan desakelurahan Umlah kasus penangkapan nelalyan pengidah pengidah perairan desakelurahan Umlah pengidakan terhadap penunggak PBB Baga Baga Kewanangan dasakelurahan Baga Indonekan Baga Baga Baga dan kewenangan desakelurahan Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga			
Neasus N	lumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelempek pengasau keamanan di perhatasan pegara dengan warga/aparat dari	•	
Jumiah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desarketurahan nepara tetangga Lumiah kasus jang dikasifikasikan merongnog keuthan NRCH dan Kestauna Bangsa Indonesia di desarketurahan tahun in 10 kasus Lumiah kortan manusia balik luka maupun tewas serta kortan materi laimnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan 0 kasus Lumiah sasusia kela berbatasan antar negara yang terjadi dasarketurahan percurian, penjarahan, permampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desarketurahan perbatasan antar negara yang terjadi desarketurahan nerunah kecamatan mater negara yang terjadi desarketurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/koda kan desarketurahan antar perbatasan antar negara yang terjadi desarketurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/koda kan desarketurahan antar perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desal-turah ke pemerintah tingkat atasnya uniah kasus yang terkat dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desal-turah ke pemerintah tingkat atasnya uniah kasus yang penyalan kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRP, Pancasila, UUD 1945 dan Bhirmeka Tunggal Ika uniah kasus yang penyalan kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRP, Pancasila, UUD 1945 dan Bhirmeka Tunggal Ika uniah kasus penangkapan nelayan helayah kepala Dasal-turahan uniah kasus penangkapan nelayan penghatan perbataran desarketurahan uniah kasus penangkapan nelayan penghatan perbataran desarketurahan uniah kasus penangkapan nelayan penghatan perbataran desarketurahan uniah kasus penangkapan nelayan penghatan penangkapan dan atau tugas desarketurahan uniah yang dipungturah sebagai kewenangan dan atau tugas desarketurahan pengara teribitusi yang menjadi tugas-kewenangan desarketurahan uniah yang dipungturah sebagai kewenangan desarketurahan uniah yang dipungturah sebagai tugas kewenangan desarketurahan uniah yang dipungturah sebagai tugas kewenangan desarketurahan pengara teribitusi yang menja		0 kasus	
lumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desakkeurahan tahun ini untah kortan manusia baki kuka magun tewa sarta kortan materi inimya akibat serangan kelompok pengacau keamanan 0 kasus untah masalah kotenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini untah kasus kejahatan percurian, penjarahan, perampokan dan intimdasi sarta teror yang terjadi di desakkelurahan perbatasan antar negara yang terjadi desakelurahan ini untah kasus kejahatan perurutan, perampokan dan intimdasi sarta teror yang terjadi di desakkelurahan perbatasan antar negara yang terjadi baki antar desakelurahan ini untah kasus sengketa perbatasan antar negara yang terjadi baki antar desakelurahan dialam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kola an desakelurahan antar prosins, antar perampokan antar negara yang dilaporkan Kepala Desat untah ke pemerintah tingkat atasnya untah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal kangang dilaporkan bersakurahan antar negara yang dilaporkan Kepala Desat untah ke pemerintah tingkat atasnya untah kasus penangkapan nelayan bersakurahan saingi di wilayah perairan desakelurahan di perairan dan daratan wilayah negari lain okasus untah kasus penangkapan nelayan pelak dan Retribusi untah kasus penangkapan nelayan perairan dan atau tugas desakelurahan di perairan dan daratan wilayah negari lain okasus untah kasus penangkapan nelayan perairan dan atau tugas desakelurahan di perairan dan daratan wilayah negari lain okasus denangkapan nelayan perairan dan atau tugas desakelurahan di perairan dan daratan wilayah negari lain di perairan daratan wilayah negari lain di perairan dan daratan wilayah negari lain di perairan daratan wilayah negari lain di perairan daratan wilayah negari lain di perairan d		0 kasus	
unitah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akbat serangan kelompok pengacau keamanan unitah masalah kelenagakerjaan di perhatasan antar negara yang terjadi da hun ini olasi serta teror yang terjadi di desarkelurahan perhatasan antar negara yang terjadi desarkelurahan ini olasi serta teror yang terjadi di desarkelurahan perhatasan antar negara yang terjadi desarkelurahan ini olasi serta teror yang terjadi di desarkelurahan perhatasan antar negara yang terjadi desarkelurahan ini olasi serta teror yang terjadi di desarkelurahan perhatasan antar negara yang terjadi desarkelurahan ini olasi serta teror yang terjadi di desarkelurahan perhatasan antar negara yang terjadi desarkelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota olasus unitah kasus yang terkati dengan perhatasan antar negara yang dilaportan Kepala DesarLurah ke pemerintah tingkat atasnya olasus unitah kasus yang terkati dengan perhatasan antar negara yang dilaportan Kepala DesarLurah ke pemerintah tingkat atasnya olasus unitah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desarkelurahan olasus penangkapan nelayan beraing di wilayah perairan desarkelurahan olasus penangkapan nelayan penangkapan da atau tugas desarkelurahan olasus di penangkapan desar			
turnlah masalah ketengapkapian di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini uurulah kasus keplatahan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidas serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara (basus uurulah kasus sengketa perbatasan yang terjadi desa/kelurahan ini untilah kasus sengketa perbatasan yang terjadi balk antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupatan/kota an desa/kelurahan mater provinsi. untilah kasus yang terkati dengan perbatasan antar negara yang dilapat yang dilapat perbatasan antar kepara yang dilapat yang dilapat yang yang yang yang yang yang yang yang	, ,		
Luntah Kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desarkelurahan perbatasan antar negara (an intimidasi serta teror yang terjadi di desarkelurahan perbatasan antar negara yang terjadi desarkelurahan dilam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kola (asus umilah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desarkelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kola (an intimidasi perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala DesarLurah ke pemerintah tingkat atasnya (an intimidasi perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala DesarLurah ke pemerintah tingkat atasnya (an intimidasi perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala DesarLurah ke pemerintah tingkat atasnya (an intimidasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika ang difaliatisa penikerikan penikerika			
Juniah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi basik ahar desarkelurahan ini umilah kasus sengketa perbatasan mang lerjadi baik ahar desarkelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota lan desarkelurahan antar provinsi. Juniah kasus yang terkat dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya Juniah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika ang dilasilitasi penyelesalamnya oleh Kepala Desa/Lurah Juniah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lani Jasus Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Biniah yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lani Jiniah walip Pajak Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Biniah yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jiniah walip Pajak Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jiniah walip Peribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jiniah walip Peribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jiniah walip Peribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jiniah walip Peribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Rep 0,00 Realisasi pungutan resmi dirid desa/kelurahan Jiniah penduduk yang mengian menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan ini untah penduduk yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan ini untah penduduk yang menja	3 7 3 7	-	
unilah kasus sengketa perbatasan yang terjadi balik antar desarkielurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota an desarketurahan antar provinsis. unilah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala DesarLurah ke pemerintah tingkat atasnya 0 kasus unilah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika quintah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika quintah kasus perangkapan nelayan asing di wilayah perairan desarketurahan unilah kasus penangkapan nelayan petanjah petangkapan petangkapat petangkapan petangkapat petangkapa		<u> </u>	
ian desa/kelurahan antar provinsi. Wasus Umilah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya O kasus Umilah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika ang difasilitiasi penyelesalannya oleh Kepala Desa/Lurah Umilah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan O kasus Umilah kasus penangkapan nelayan petanjpeternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain O kasus S. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Enis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan I jenis Umilah Wajib Pajak Rp 167.519.943,00 Resalisasi PBB Rp 167.519.943,00 Resalisasi PBB Rp 167.519.943,00 Resalisasi PBB Rp 167.519.943,00 Resalisasi PBB O dindakan I jenis Umilah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan O jenis Umilah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Rp 0.00 Resalisasi ribitu yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan O jenis Resalisasi ribitu yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan O jenis Resalisasi pungutan resmi liahnya di Desa/Kelurahan Rp 0.00 Resalisasi pungutan resmi dinya di desa/kelurahan O jenis Resalisasi pungutan resmi dinya di desa/kelurahan O jenis Resalisasi pungutan resmi dinya di desa/kelurahan Apo 0.00 Resalisasi pungutan resmi dinya di desa/kelurahan O kasus C. Partisipasi Politik Jumilah penduduk yang menjami penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik dun permunan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik yang menjadi pengurus sapari di Desa/Kelurahan ini yang aktif di partai politik yang menjadi pengurus partai politik dan desa/kelurahan ini yang penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik yang menjadi pengurus partai politik dan desa/kelurahan ini umiah penduduk yang dipinid dalama Pemilu Lejaslatif yang lalu Umilah peratudi kyang dipini	lumba kasus apprikata perhataan yang teriodi baik antar daga/kalurahan dalam kacamatan maunun antar kacamatan antar kabunatan/kata		
Lumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya 0 kasus Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bargsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika opang disalitias penyelesalannya oleh Kepala Desa/Lurah 0 kasus Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di Wilayah perairan desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain lawasus penangkapan nelayan asing di Wilayah perairan desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain lawasus penangkapan nelayan asing di Wilayah perairan dan atau tugas desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain lawasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan dasa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain lawasus penangkapan nelayan salaya dan atau tugas desa/kelurahan 1 jenis Benis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan 1 jenis Benis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan 1 jenis Benis pajak yang dipungut sebagai kewenangan desa/kelurahan 75,00 % Benis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan 0 lindakan Benis Retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0 orang Benis pajudan resmi lingkat desa/kelurahan 0 orang Benis pajudan resmi di desa/kelurahan 0 jenis Benis pungutan resmi di desa/kelurahan 0 kasus Bumlah peratup Alika bara pemilika pang		0 kasus	
tumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika gang difasililasi penyelesalannya oleh Kepala Desadurah umlah kasus penangkapan nelayan perlami peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain oleh Kepala Desadurah sunjah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain oleh kepala pengangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain oleh kepala pengangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain oleh kasus penangkapan nelayan/petani/petanak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain di pengangkapan pelayan/petani/petanak/ penangan dasa/kelurahan di penangan desa/kelurahan di penangangan desa/kel		0.1	
yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Luriah () Kasus			
Lumlah kasus penangkapan nelayan pelayan pelayan perairan desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain wasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain basus 0 kasus 3. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi 1 jenis enis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan 1 jenis umlah Wajib Pajak 1815 orang araget PBB Rp 167.519.943,00 Realisasi PBB 0 indakan umlah Tindakan terhadap penunggak PBB 0 indakan lenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan 0 jenis umlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0 jenis lenis Retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0 jenis 'arget teribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0 jenis 'arget pungutan resmi lidi besa/kewenangan desa/kelurahan 0,00 % kealisasi teribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0 jenis 'arget pungutan resmi lidi besa/kelurahan 0 jenis 'arget pungutan resmi lidi besa/kelurahan 0 jenis 'arget pungutan resmi lidi desa/kelurahan 0 jenis 'umlah parati politik dan Pemilihan Umur 0 kasus 'b. Jurniah Partai Politik d	lumich konin vong mengarah kanada tindakan disintagrasi bangsa dan pengingkaran NKRI. Danasaila, LILID 1045 dan Phinnaka Tunggal Ika		
tumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain 8. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika		
S. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi lenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Interis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Interis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Interibusi PBB Rp. 167.519.943,00 Realisasi PBB Rp. 167.519.943,00 Realisasi PBB O tindakan Interibusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Inuniah wajib retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Inuniah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Rp. 0.00 Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Rp. 0.00 Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Rp. 0.00 Realisasi pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Rp. 0.00 Realisasi pungutan resmi lingkat desa/kelurahan Rp. 0.00 Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan Rp. 0.00 Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan Rp. 0.00 Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan O kasus Lumlah peratip Politik dan Pemilihan Umum Lumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang talu Lumlah peratupuan dari penduduk desa/kelurahan ini Lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini Lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini Lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini Lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini Lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini Lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini Lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus	
lenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan lumlah Wajib Pajak lanis Pajak Realisasi PBB Realisasi Paga Penjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi Paga Penjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi Petribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi Pungutan resmi lainnya di Desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi lingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan resmi di d	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus	
lenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan lumlah Wajib Pajak lanis Pajak Realisasi PBB Realisasi Paga Penjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi Paga Penjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi Petribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi Pungutan resmi lainnya di Desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi lingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan resmi di d	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus	
tumlah Wajib Pajak arget PBB Rp 167.519.943,00 Realisasi PBB tumlah Tindakan terhadap penunggak PBB tumlah argi pungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan olenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan olenis Retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan arget retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan arget negungutan resmi lainya di Desa/Kelurahan olenis pungutan resmi lainya di Desa/Kelurahan arget pungutan resmi dingkat desa/kelurahan Rp 0,00 Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan olenis pungutan resmi di desa/kelurahan liar C. Partisipasi Politik olenis pungutan pungutan liar C. Partisipasi Politik olenis penduduk yang memiliki hak pilih ali penduduk yang memiliki hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu umlah penduduk yang mengunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu umlah penduduk yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini umlah parduduk yang menjalityang partai politik dari desa/kelurahan ini umlah penduduk yang menjalityang partai politik dari desa/kelurahan ini umlah penduduk yang menjadi ugang bengurus partai politik dari desa/kelurahan ini umlah penduduk yang menjadi ugang bengurus partai politik dari desa/kelurahan ini umlah penduduk yang menjadi tugang bengurus partai politik dari desa/kelurahan ini umlah penduduk yang menjadi tugang bengurus partai politik dari desa/kelurahan ini	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	0 kasus 0 kasus	
Rept PBB Realisasi PBB 75,00 % Realisasi PBB 80 O tindakan 80 Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan 80 Jenis Retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 80 O orang Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 80 O ow Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 80 O ow Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 80 Jenis Repungutan resmi diahungadi desa/kelurahan 80 O ow Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 90 O ow Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 90 O	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi	0 kasus 0 kasus 0 kasus	
Realisasi PBB 75,00 % lumlah Tindakan terhadap penunggak PBB 0 jindakan lenia Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan 0 jenis lumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0 orang Rp 0,00 Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0,00 % Realisasi pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Rp 0,00 Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 % Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 % Realisasi pungutan liar 0 kasus lumlah penyelesaian kasus pungutan liar 0 kasus lumlah penduduk yang memilihan Umum lumlah penduduk yang memiliki hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu 2900 orang lumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu 2900 orang lumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/kelurahan ini 4 partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/kelurahan ini 0 partai lumlah partai politik yang memigan pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini 0 partai lumlah penduduk yang memigan pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini 0 partai lumlah penduduk yang memigan pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini 0 partai lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan saing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 0 kasus 1 jenis	
lumlah Tindakan terhadap penunggak PBB lenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan lumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan larget retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Rep 0,00 % lenis pungutan resmi di desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan resmi di di partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan resmi di desa/kelurahan di desa/kelurahan resmi di desa/kelurahan d	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak	0 kasus 0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang	
lenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan lumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan arget retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Rp 0,00 Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0,00 % lenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan 0 jenis arget pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Rp 0,00 Realisasi pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Rp 0,00 Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan Rp 0,00 Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 % Indiah kasus pungutan liar 0 kasus Indiah Penduduk yang umaliki hak pilih Indiah Peratria Politik dan Pemilikan Umum Indiah penduduk yang mengunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Indiah perduduk yang mengunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Indiah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah perduduk yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini Umlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00	
lumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Rp 0,00 Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0,00 % Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0,00 % Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0,00 % Realisasi pungutan resmi di nesa/kelurahan Rp 0,00 Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 % Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 % Realisasi pungutan liar 0 kasus Realisasi pungutan liar Realisasi pungutan liar Realisasi pungutan liar Realisasi pungutan liar Rea	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 %	
arget retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0,00 % Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0,00 % Renis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Rp 0,00 Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 % Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 % Realisasi pungutan liar 0 kasus Rp 0,00 Realisasi pungutan liar 0 kasus Rp 0,00 mmalah penyelesaian kasus pungutan liar 0 kasus Realisasi pungutan liar 0 kasus Realisasi politik 1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum Realisasi Politik dan Pemiliki hak pilih Realisasi Politik dan Pemiliki pada pemilu legislatif yang lalu Realisasi penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Realisasi penguna dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik Realisasi penguna sampai di Desa/Kelurahan ini desa/kelurahan i	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan	
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan 0,00 % lenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Realisasi pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 % lumlah kasus pungutan liar 0 kasus Lumlah penyelesaian kasus pungutan liar 0 kasus C. Partisipasi Politik 1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum lumlah penduduk yang memjiki hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu lumlah perduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu lumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik lumlah partai politik yang memjunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini lumlah partai politik yang memgunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini lumlah partai politik yang memgunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini lumlah partai politik yang memgunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis	
lenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Rp 0,00 Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan Rp 0,00 % lumlah kasus pungutan liar O kasus lumlah penyelesaian kasus pungutan liar C. Partisipasi Politik Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum lumlah penduduk yang mengjunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu lumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang	
Arget pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan Q,00 % Umlah kasus pungutan liar Q kasus Umlah penyelesaian kasus pungutan liar Q kasus Umlah penyelesaian kasus pungutan liar Q kasus C. Partisipasi Politik Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum Umlah penduduk yang memiliki hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Umlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Umlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Umlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan Umlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan Umlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00	
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0,00 % lumlah kasus pungutan liar 0 kasus lumlah penyelesaian kasus pungutan liar 0 kasus C. Partisipasi Politik 1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum lumlah penduduk yang memiliki hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu lumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu lumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik yang memiliki yang memiliki yang memiliki yang memiliki yang memiliki pada pemilu legislatif yang lalu lumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini lumlah partai politik yang memjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan 4 orang lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 %	
lumlah kasus pungutan liar 0 kasus	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis	
Lumlah penyelesaian kasus pungutan liar C. Partisipasi Politik I. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum Lumlah penduduk yang memiliki hak pilih Lumlah penduduk yang memiliki hak pilih agon pemilu legislatif yang lalu Lumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Lumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Lumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik Lumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini Lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan Lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu O kasus O partai	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah majib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 11815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00	
C. Partisipasi Politik I. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum Iumlah penduduk yang memiliki hak pilih Iumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Iumlah perduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Iumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik Iumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini Iumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Iumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Iumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan Iumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 %	
. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum lumlah penduduk yang memiliki hak pilih agou orang lumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu lumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik umlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini umlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan 4 orang umlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan nelayan saing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus	
. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum lumlah penduduk yang memiliki hak pilih agou orang lumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu lumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik umlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini umlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan 4 orang umlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan nelayan saing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus	
. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum lumlah penduduk yang memiliki hak pilih agou orang lumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu lumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik umlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini umlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini umlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan 4 orang umlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan nelayan saing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus	
lumlah penduduk yang memiliki hak pilih 3000 orang lumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu 2900 orang lumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik 0 orang lumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini 1 partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini 1 umlah partai politik yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan 4 orang lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi di desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan Jumlah kasus pungutan liar Jumlah kasus pungutan liar	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus	
tumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu 2900 orang lumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik 0 orang lumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini 0 partai lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan 4 orang lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target pungutan resmi lainnya di Desa/kelurahan Target pungutan resmi di desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus	
lumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik 0 o rang lumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini 4 partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini 0 partai lumlah partai politik yang menpadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini 4 orang lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi di desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus	
lumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini 4 partai lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini 0 partai lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan 4 orang lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Junlah benyutan resmi di desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan Jumlah kasus pungutan resmi di desa/kelurahan Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar C. Partisipasi Politik 1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	0 kasus 0 kasus 1 jenis 11 jenis 1815 orang 1815 orang 1816 7.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang 18 p 0,00 0,00 % 0 jenis 18 p 0,00 0,00 % 0 kasus 0 kasus 0 kasus	
lumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini 0 partai lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan 4 orang lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target pungutan resmi lainnya di Desa/kelurahan Target pungutan resmi di desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan Target pungutan resmi di desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1315 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus 0 kasus 0 kasus	
lumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan 4 orang lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi dinyas di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi dinya di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi di desa/kelurahan Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus 0 kasus 3000 orang 2900 orang 0 orang	
lumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu 2 orang	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah majib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jumlah semi tinnya di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan Realisasi pungutan resmi lingkat desa/kelurahan Jumlah kasus pungutan resmi di desa/kelurahan Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar Jumlah penduduk yang menjaliki dan Pemilihan Umum Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik Jumlah peratai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 2900 orang 2900 orang 0 orang	
	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan saing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan saing di wilayah perairan desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah majib retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Jenis pungutan resmi tingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi dingkat desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi didesa/kelurahan Jumlah partai politik dan Pemilihan Umum Jumlah partai Politik dan Pemilihiha Umum Jumlah penduduk yang memgunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Jumlah peratai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/kelurahan ini Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	0 kasus 0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang	
lumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil 3000 pemilih	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesalannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan saing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan saing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan saing di wilayah perairan desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan ili Jumlah penduduk yang memgiliki hak pilih Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Jumlah peratai politik yang memgunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Jumlah peratai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Jumlah paratai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Jumlah paratai politik yang mengadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	0 kasus 0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang	
	Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesalannya oleh Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan Jumlah Wajib Pajak Target PBB Realisasi PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB Jumlah wajib retribusi yang dipungut sebagai tugas/kewenangan desa/kelurahan Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan Target pungutan resmi dinyas di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi dinyas di Desa/Kelurahan Target pungutan resmi di desa/kelurahan Jumlah penduduk yang menjamiki hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Jumlah penduduk yang menjawakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu Jumlah partai politik yang mengunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Jumlah partai politik yang mengunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini Jumlah penduduk yang menjadi pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan ini	0 kasus 0 kasus 0 kasus 1 jenis 1815 orang Rp 167.519.943,00 75,00 % 0 tindakan 0 jenis 0 orang Rp 0,00 0,00 % 0 jenis Rp 0,00 0,00 % 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 tasus 0 orang 2900 orang 0 orang 4 partai 4 orang 2 orang	

2. Pemilihan Kepala Daerah			
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	3000 orang 3000 pemilih		
Jumlah penilih yang menggunakan hak pilih dalam penilu Gubenur yang lalu	3000 pemilih		
7,000			
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan			
Penentuan Jabatan Kepala Desa	Dipilih masyaraka	at secara langsung	
	D::		
Penentuan Sekretaris Desa	Ditunjuk, diangka	t dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota	
	Dituniuk diangka	t dan ditetapkan oleh Kepala Desa	
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	serta dilaporkan l		
Masa jabatan Kepala Desa	6 tahun		
Danastran Jahatan Lurah dan Darasakat Kalurahan tarmasak Kanala Lingkungan			
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan			
4. Pemilihan BPD			
	5 orang		
Penentuan anggota BPD		akilan masyarakat desa secara	
	musyawarah dan	mulakat	
Pimpinan BPD	Dipilih dari dan ol	eh anggota BPD secara langsung	
	1 22 44 01		
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Ada		
Anggaran untuk BPD	Ada		
	Peraturan Des Permintaan ke	a 5 buah terangan dari Kepala Desa 187 kali	
		terangan dari Kepala Desa 187 kali raturan Desa. 5 buah	
		spirasi masyarakat 3 kali	
Produk keputusan BPD tahun ini		endapat kepada Kepala Desa 15 kali	
	Menyampaikar Desa 10 kali	n usul dan pendapat kepada Kepala	
		efektivitas pelaksanaan APB Desa 2	
	kali		
F. Domillhan dan Funnsi Lambana Kamasyandratan			
5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada		
Dasar hukum keberadaan Lembaga	Keputusan Kepal	a Desa	
Kemasyarakatan Desa/LKD	теришзан кера	a Desa	
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	65 unit organisas	i	
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Belum diatur		
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	6 unit organisasi	t casara lamasuma	
Pemilihan pengurus LKD/LKK Pemilihan pengurus organisasi anggota	Dipilin olen rakya	t secara langsung	
LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,	Ditunjuk dan diar	gkat oleh Ketua LKD/LKK	
Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Aktif		
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	0 kegiatan		
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK			
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	1 kegiatan		
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	. nogiaia	jacan	
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya			
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	9999 Memadai		
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	6,00 %		
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur		elum terisi semuanya	
organisasi anggota LKĎ/LKK Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	9999		
Treglatan aunimisuasi uan Tretatausanaan END/ENT	9999		
	I		
C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN			
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan			
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkunga	n	5 kali	
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan		60,00 %	
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan		54,00 % 6,00 %	
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan		2,00 %	
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif		Ya	
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan		Ya	
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan		Ya 25,00 %	
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa		10,00 %	
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untu	k dilaksanakan di	3,00 %	
desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel		2 kegiatan	
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)		Ada	
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)		Ada	
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan			
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan			
Provinsi		<u> </u>	
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang		0 . kegiatan	
2. Deranserta masyarakat dalam Belaksanaan dan Belestarian Hasil Dembangunan		<u> </u>	

10,00 %

50,00 % 7 kegiatan

2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang

Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang dilunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	2 kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	1,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	7,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	7,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan d	di 2.00 %
desa dan kelurahan oleh masyarakat	2,00 70
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	Ada
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala	0 kasus
Desa/Lurah	
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	1 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	1 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	2 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	1 kegiatan
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk	-
Jumlah kelompok arisan	5 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	0 orang
Ada tidaknya dana sehat	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Keturahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	Ada
2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	
Address	1
4. Adat Istiadat	1
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Pernah Ada
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	9999
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	9999
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Pernah Ada
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Pernah Ada
	Aktif
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Aktif
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	Aktif 0 jenis
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat	Aktif
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	0 jenis 0 jenis
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis 0 jenis 0 jenis
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	0 jenis 0 jenis 0 jenis 0
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 o 0
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 o 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di	Aktif 0 jenis 0 Jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 o 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perrangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan perrangan dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari esa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dibirhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar S. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari reksarkelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desarkelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desarkelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desarkelurahan Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 o 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 tasus 0 lenis 0 len
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak yenduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat sand kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 companis 0 jenis 1 0
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT/RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT/RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari numa kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingim mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak warga yang ingim mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi Banyak lahan terlantar yang tidak dimanfaatkan	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 tasus 0 lenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 lenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 jenis 0 jen
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari Rwa tau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari Rwa tau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari Rya data sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari Rya data sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari Rya data sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhetikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan pekarangan di sekitar pe	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 tasus 0 lasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RWatau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RWatau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari Rawatau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari Rewatau sebutan lain kepada warga Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan akpelayanan kepada masyarakat Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepenting	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RRV atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipindah karena kana kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipindah karena kana kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi Banyak lahan terlantar yang tidak dikadi dimanfaatkan Jumlah petani pada mu	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 tasus 0 lenis
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lain, pemerasan dan sejenisnya Dibirchentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diburutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diburutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kapatan yang bersitat hiburan dan rekreasi yang diinisattif masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi Banyak lahan t	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 o 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lenis 0 jenis 0 kasus 0 lenis 0 len
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RV atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RV atau sebutan lain kepada warga Kasus aparat RT/FRW atau sebutan lain kepada warga Kasus aparat RT/FRW atau sebutan lain yang di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar pemerasan dan sejenisnya Banyak hayarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak kerja ngin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kerja ngin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kerjatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat a	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lenis 0 jenis 0 kasus 0 kas
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinarbagi keluarga tidak mampurfakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumilah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari kerana kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinsiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak didelola pemiliknya/petani berdasi Banyak lahan pekarangan di sekilar perumahan yang tidak dimanfaatkan Jumiah petani pada musim gagat tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain Jumiah petani pada musim gagat tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain Jumiah petanya pada musim ti	Aktif
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampurfakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumilah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumilah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus gungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak karga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinsiatifi masyarakat sendiri Masyarakat kegitan yang bersifat hiburan dan rekreasi	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus 0 las
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinarhagi keluarga tidak mampulfakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumilah jenis pungutan liar diri anak gelandangan di sudut jalanan Jumilah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari Ratau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jiberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kanlor desa/kelurahan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang meneglebihkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat dari unsu	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RTR sutau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RTR Watau sebutan lain, pemerasan dan sejenisnya Jenis pungutan dari RTR Watau sebutan lain, pemerasan dan sejenisnya Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dibutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dibutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desakefurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kagiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinsiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan Jumlah nelayan pada musim tidak melau yang memanfaatkan keterampilan/keahilan lainnya untuk mencari pekerjaan lain Jumlah nel	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulanga kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari mak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari mak gelandangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan peroranganisasi dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan peroranganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RRV atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kesaus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat kateran kana kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan adhinistrasi di kantor desa/kelurahan Banyak kedukuh yang mengeluhkan memburunknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegitan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatif masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan k	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan perorangan dari numah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kapada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desakelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desakelurahan kepada warga Kasus aparar RY/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banya	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 k
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampurfakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desarkelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desarkelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desarkelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dijecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pengutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dibutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak kaparakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di karitor desarkelurahan Banyak penduduk, yang ingini mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desarkelurahan Banyak penduduk, yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus 0 kasus 0 lasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan peroragnisasi dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan peroragnisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparar RY/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, p	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus 0 las
Adat istiadat dalam menulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinarbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang prakek jalan piritak dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RS atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/keutrahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberheritikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberheritikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberheritikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberheritikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberheritikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberheritikan dengan mengeluhikan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kepatan kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak kerapatan yang bersitaf hiburah dan rekresas yang diinisatif masyarakat sendiri masyarakat sendiri masyarakat sendiri masyarakat sendiri masyarakat pang bersitaf hiburah dan rekresas yang diinisatif masyarakat sendiri masyarakat pang bersitaf hiburah dan rekresas yang diinisatif masyarakat sendiri masyarakat pang bersi	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lenis
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampurfakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumiah jenis pungutan liar dai ranak gelandangan di sudut jalanan Jumiah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-mita sumbangan terorganisa di dari rumah ke rumah Peminta-mita sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Peminta-mita sumbangan parket jalan pintas dalam mencani uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desakeluriahan kepada warga Jenis pungutan lain ing reperasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak kenjatan yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desakelurahan memburutknya kualitas pelayanan repada masyarakat Banyak kenjatan yang bersilat hiburan dan rekreasi yang dinisialifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lenis
Adat istiadat dalam memulikan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam menudikan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-mita sumbangan terorgansaari dari rumah ke rumah Peminta-mita sumbangan terorgansaari dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan liain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan liain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan liain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan liain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan liain yadi desa dari kutanan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus sungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus baran kasus baran kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan membangan pemeran para sela dari aparat desakeuturahan Banyak beraduku yang menalah baran biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi d	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 o 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam menudihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar di rafi nank gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di rafi nank gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan terorganisari dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisari dari rumah ke rumah Semakin berkambang pratekt jalan printas dalam mencani uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Lenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lain kepada warga Johingan kenak sekas supungutan lain di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan lair, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan lair, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan lair, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan lair, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan lair, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan lair, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan lair, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan bisya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa. Kelurahan Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinislatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dendiri musur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Benyak penduduk Lusa Wilayah Desai/Kelurahan sangat lusa Banyak lahan tid	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lenis 0 jenis 0 kasus
Adat istiadat dalam memulikan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istiadat dalam menudikan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-mita sumbangan terorgansaari dari rumah ke rumah Peminta-mita sumbangan terorgansaari dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan liain kepada warga Jenis pungutan dari RT atau sebutan liain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan liain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan liain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan liain yadi desa dari kutanan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus sungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan hormat karena kena kasus baran kasus baran kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhenikan dengan membangan pemeran para sela dari aparat desakeuturahan Banyak beraduku yang menalah baran biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi d	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 o 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lasus
Adat istadat dalam merulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adat istadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampuflakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar dai anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dai anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dai anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar dai anak gelandangan di sudut jalanan Peminta-mita sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Peminta-mita sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Peminta-mita sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Jenis pungutan dari RY datu sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lainka geda warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lainka geda warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lainka geda warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lainka geda warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lainka geda warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lainka geda warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lainka geda warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lainka geda warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lainka geda warga Jenis pungutan dari RY datu sebutan lainka geda warga Jenis pungutan lain jenis dalam pungutan lainkan pemerasan dan sejenisnya Dipridah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutak karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Di	Aktif 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 0 0 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 lenis 0 jenis 0 kasus
Adal isladad dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya Adal isladad dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampulfakir miskin/terlantar 5. Sikap Dan Mental Masyarakat Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perconganisasi dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari sepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kesasa dari kelan sejanisnya Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kelan sejanisnya Jenis pungutan dari RY atau sebutan lain kelan selah sejan	Aktif

1. PKK	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	4 Jenis
2. KARANG TARUNA	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	5 Jenis
3. BADAN USAHA MILIK DESA	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	1 Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	
1 3 33 3 7	
XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	
A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan	
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 2.209.803.720,13
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 0,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 108.500.000,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 504.198.383,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat	Rp 0,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 785.031.368,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 583.380.000,00
B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah	
	4
Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD	1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada menyerekat	1 jenis
kepada masyarakat	
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	1
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	1 1
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	1
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala	1 1
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	1 1 1 jenis
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	1 1 1 jenis 0 kasus
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	1 1 1 jenis 0 kasus
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	1 1 1 jenis 0 kasus
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Ada -
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 5 Ruang Ada Ada Ada
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Ada
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 5 Ruang Ada Ada Ada
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Ada
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada 0 buah 9 buah
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 buah 9 buah 9 buah
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah Lumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah lamari arsip	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 buah 9 buah 9 buah 4 buah
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah lamari arsip Komputer	1 1 1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah meja Jumlah lamari arsip Komputer Mesin fax	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 unit 0 unit
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah kursi Jumlah lamari arsip Komputer	1 1 1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah meja Jumlah meja Jumlah mari arisip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 unit 0 unit
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesalkan kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesalkan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 buah 9 buah 9 buah 4 buah 9 unit 0 unit 1 unit
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah lamri arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Nada - S Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada O buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 unit 0 unit 1 unit Ada dan Terisi
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah mari arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Nada - S Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada O buah 9 buah 9 buah 4 buah 9 unit 0 unit 1 unit Ada dan Terisi Ada dan Terisi Ada dan Terisi
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Reperidudukan	1 1 1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 buah 9 buah 9 buah 4 buah 9 unit 0 unit 1 unit Ada dan Terisi Ada dan Terisi Ada dan Terisi Ada dan Terisi Ada dan Terisi Ada dan Terisi
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah lapins pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah menia misi tik Jumlah menia tiki Jumlah menia Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah Buku Data Inventaris Keputusan Kepala Desa/Lurah Buku Data Inventaris Keputusan Kepala Desa/Lurah Buku Data Inventaris Keputusan Kepala Desa/Lurah	1 1 1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus 2 kasus 2 kasus 3 kasus 4 kasus 3 kasus 4 kasus 4 kasus 5 kasus 5 kasus 6 kasus 6 kasus 7 kasus 8 kasus 8 kasus 8 kasus 8 kasus 9 buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 unit 1 unit 1 unit 1 unit Ada dan Terisi
kepada masyarakiat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah jenis pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah meja Jumlah misi Jumlah alimari arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Cata Nepala Desa/Lurah Buku Data Inventaris	1 1 1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 buah 9 buah 9 buah 4 buah 9 unit 0 unit 1 unit Ada dan Terisi
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah jenis pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah meja Jumlah lamari arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Data Peraturan Desa Buku Data Peraturan Sesa Buku Data Peraturan Sesa Buku Data Peraturan Sesa Buku Data Paratt	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus Nada - S Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada D buah 9 buah 9 buah 9 buah 1 tunit Ada dan Terisi
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah pinis pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah mela Jumlah halinari arsip Kemputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1.B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Administrasi Kependudukan Buku Data Pentarias Buku Data Pantat Busu Administrasi Pejak dan Retribusi Buku Data Panta Ras Desa Buku Data Panta Ras Desa Buku Data Panta Ras Desa Buku Data Tanah Kas Desa Buku Data Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada O buah 9 buah 9 buah 9 buah 1 tunit Ada dan Terisi
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah pinis pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah meisa tuk Jumlah meisa tuk Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah jama arisip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa Listrak Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa/Lerahan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Kependudukan Buku Data Janyat Kepala Desa Buku Administrasi Kependudukan Buku Data Janyat Kepala Desa Buku Administrasi Kependudukan Buku Data Tanah Kas Desa Buku Data Tanah	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada O buah 9 buah 9 buah 4 buah 9 unit 0 unit 1 unit Ada dan Terisi
kepada masyarakit Sitatus laprora keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desal/urah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah misi Sumlah misi arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1.B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Data Peraturan Desa Buku Data Peraturan Sesa Buku Data Paratat Buku Administrasi Kependudukan Buku Administrasi Kependudukan Buku Data Tanah Kas Desa Buku Data Tanah Kas Desa Buku Data Tanah Kas Desa Buku Data Tanah Masyarakat	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada O buah 9 buah 9 buah 4 buah 9 unit 0 unit 1 unit Ada dan Terisi
kepada masyarakat Satus lapora keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah janis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah pianis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah mina jarip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1.B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Kependudukan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Kependudukan Buku Data Janath Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retribusi Buku Data Tanah Buku Data Tanah Buku Data Tanah Buku Data Tanah	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 1 jenis 0 kasus Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ad
kepada masyarakat Satusi alpora keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah lanis media informasi kinerja kepala desa dan turah kepada masyarakat Jumlah lanis mengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah CC. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah menja Jumlah minari arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1.B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Kependudukan Buku Data Inventaris Buku Data Tanah Kas Desa Buku Administrasi Paga dan Retribus Buku Hanishasi Paga dan Retribus Buku Potal Tasa dan Kelurahan Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Potal Tasa dan Kelurahan Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Potal Tasa dan Kelurahan	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 buah 9 buah 9 buah 9 buah 1 tunit 1 unit Ada dan Terisi Ada dan Tidak Ada Tidak Ada
kepada masyarakat Satusi alporan kelerangan pertanggungiawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewaijban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada desa/durah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disalesaikan kepala desa/lurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin itk Jumlah kesin itk Jumlah kursi Jumlah kursi Jumlah kursi Jumlah alaya arasip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Repada Desa(Lurah Buku Data Inventaris Buku Data Inventaris Buku Data Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Keltibusi Buku Administrasi Pagak dan Keltibusi Buku Administrasi Pagak dan Keltibusi Buku Administrasi Pagak dan Keltibusi Buku Agenda Ekspedisi Buku Agenda Ekspedisi Buku Agenda Ekspedisi Buku Data Inventi Penduku Buku Data Inventi Penduku Buku Agenda Ekspedisi Buku Agenda Ekspedisi Buku Agenda Ekspedisi Buku Agenda Kepada Henduku Buku Agenda Ekspedisi Buku Agenda Kepada Henduku Buku Administrasi Pemerintahan Desa Kelurahan	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada O buah 9 buah 9 buah 9 buah 1 tunit Ada dan Terisi Ada dan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Terisi
kepada masyarakat Satusa laporan keterangan pertanggungiawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelengaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah lasus pengaduan masyarakat terhada masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada desadurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada desaflurah desaflurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai DesaKelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mish mish tik Jumlah mish mish diamat arisip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1.B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Rependudukan Buku Data Iranah Kas Desa Buku Administrasi Rependudukan Buku Data Iranah Kas Desa Buku Administrasi Pengerintahan Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Data Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pengerintahan Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Data Tanah Ras Desa Buku Administrasi Pengerintahan Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Data Tanah Ras Desa Buku Administrasi Pengerintahan Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Data Tanah Buku Data Indah Penduduk	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada O buah 9 buah 9 buah 9 buah 1 tunit Ada dan Terisi
kepada masyarakat Satusa laporan keterangan pertanggungiawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelengaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah lasus pengaduan masyarakat terhada masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada desadurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada desaflurah desaflurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai DesaKelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mish mish tik Jumlah mish mish diamat arisip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1.B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Rependudukan Buku Data Iranah Kas Desa Buku Administrasi Rependudukan Buku Data Iranah Kas Desa Buku Administrasi Pengerintahan Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Data Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pengerintahan Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Data Tanah Ras Desa Buku Administrasi Pengerintahan Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Data Tanah Ras Desa Buku Administrasi Pengerintahan Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Data Tanah Buku Data Indah Penduduk	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada O buah 9 buah 9 buah 9 buah 1 tunit Ada dan Terisi Ada dan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Terisi
kepada masyarakat Satusa laporan keterangan pertanggungiawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelengaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah insus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disempaikan kepada kepala desalurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin lik Jumlah kursi Jumlah kursi Jumlah kursi Jumlah kursi Jumlah alar arsip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Data Irentaris Kepand Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Irentaris Pemerintahan Buku Data Iranah Kepala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Iranah Kapala Desa/Lurah Buku Data Iranah Kapala Desa/Lurah Buku Data Iranah Kapala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Masyarakat Buku Data Iranah Kapada Hasa Buku Administrasi Pajak dan Retribusi Buku Data Iranah Kapada Desa Buku Data Iranah Kapada Desa Heribusi Buku Data Iranah Kapada De	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada O buah 9 buah 9 buah 9 buah 1 tunit Ada dan Terisi
kepada masyarakat Satusi laporan keterangan pertanggungiawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada desafurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disalesaikan kepala desa/lurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Ari bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah mesin tik Jumlah kursi Jumlah kursi Jumlah hursi Jumlah hursi Sumlah mesin tik Jumlah pertan arisip Komputer Mesin fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1.B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Rependuduan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Rependuduan Buku Data Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pengaduan Masyarakat Buku Data Tanah Kas Desa Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Data Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retirbusi Buku Aganda Respedisi Buku Apala Tanah Kas Desa Buku Data Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retirbusi Buku Administrasi Pajak dan Retirbusi Buku Administrasi Pajak dan Retirbusi Buku Aganda Respedisi Buku Apanda Respedisi Re	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada O buah 9 buah 9 buah 4 buah 9 unit 0 unit 1 unit Ada dan Terisi
kepada masyarakat Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah janis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disempalikan kepada kepala desalfurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesalkan kepala desalfurah C. Prasaran Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Listrik Aif bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah meja Jumlah hainari arsip Konputer Konputer 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Buku Data Paraturan Desa Buku Administrasi Kependudukan Buku Data Parata Busa Busa Buku Jamlah Busa Buku Jamlah Busa Busa Busa Busa Buku Jamlah Busa Beraturah Busa Buku Data Parata Busa Buku Jamlah Busa Buku Jamlah Busa Busa Busa Buku Jamlah Busa Beraturah Busa Buku Data Parata Busa Buku Jamlah Busa Basa Buku Jamlah Busa Basa Buku Jamlah Kapala Desa/Kelurahan Buku Data Parata Busa Busa Buku Jamlah Busa Busa Data Parata Busa Buku Jamlah Kapada Busa Busa Buku Jamlah Kapada Busa Busa Jamlah Buku Laporan Pengaduan Masyarakat Buku Data Indak Penduduk Buku Data Indak Penduduk Buku Data Indak Penduduk Buku Rejatirasi Pelayaan Penduduk Buku Rejatirasi Pelayaan Penduduk	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 9 buah 9 buah 9 buah 4 buah 9 unit 0 unit 1 unit Ada dan Terisi
kepada masyarakt Satus laporan ketarangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumah jenis media informasi kinerja kepala desa dan hurah kepada anasyarakat Jumiah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desadurah Jumiah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepada kepala desadurah Jumiah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepada desalurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN Gedung Kantor Jumiah ruang kerja Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Litarik Litarik Air bersih Telepon 1. A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumiah meni ik Jumiah inan meni ik J	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 9 buah 9 buah 9 buah 10 unit 1 unit Ada dan Terisi
kepada masyarakt Status laporan ketarangan pertanggungjawaban kepala Desa Laporan kinerja penyelenggarran tugas, wewanan, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desaflurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselasiakan kepada kepala desaflurah Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselasiakan kepada kepala desaflurah C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desafkelurahan 1. PEMERINTAH DESAfkELURAHAN Gedung Kantor Jumlah ruang kerja Balial DesaKelurahan/sejenisnya Listrik Air bersih Telepon 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesih lik Jumlah meja Jumlah meja Jumlah huani anaja Komputer Mesih fax Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 1. B. Administrasi Pemerintahan Desafkelurahan Buku Data Peraturan Desa Buku Administrasi Kependudukan Buku Data Paraturan Besa Buku Kepala Besa Lurah Buku Data Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retribusi Buku Jata Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retribusi Buku Jata Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retribusi Buku Jata Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retribusi Buku Jata Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retribusi Buku Jata Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retribusi Buku Jata Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retribusi Buku Jata Tanah Kas Desa Buku Administrasi Pajak dan Retribusi Buku Jata Tanah Kas Desa Buku Penduduk Buku Data Penduduk Sementara Buku Data Penduduk Sementara	1 1 1 jenis 0 kasus 0 kasus 0 kasus Ada - 5 Ruang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada D buah 9 buah 9 buah 9 buah 1 tunit Ada dan Terisi

Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	Tidak Ada
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada dan Terisi
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD	
Gedung Kantor	1
Jumlah ruang kerja	1 Ruang
Balai BPD	0 - 1
Listrik	1
Air bersih	2
Telepon	0
The state of the s	
2. A layundayin day Alathulis banday	
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik	0 buah
Jumlah meja	2 buah
Jumlah kursi	5 buah
Jumlah almari arsip	1 buah
Somputer	2 unit
Mesin fax	0 unit
THE STATE OF THE S	o u.m.
2.B. Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	1
Buku Buku Administrasi Keanggotaan	0
	1
Buku kegiatan BPD Buku himpunan peraturan desa	0
Buku Lainnya	0
PROCEDULE DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DAT	<u> </u>
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	lo.
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	0
Alat tulis kantor	0
Barang inventaris	0 Jenis
Buku administrasi	0 Jenis
Jenis kegiatan	0 Jenis
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja	0 Orang Ruang
Juliiani tuang kerja	Ruang
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	Ada
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	Ada
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD	Ada
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing	Ada
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan Iembaga kemasyarakatan	10 kegiatan
lumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	2 kanistan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	2 kegiatan 0 kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber	2 kegiatan 0 kegiatan 2 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan	0 kegiatan 2 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga	0 kegiatan 2 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala provinsi	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 2 kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pennigkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pennigkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pennigkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penngananan berdapa alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pennafaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Femberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penangatan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penngaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggalangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penanganan sosial budaya masyarakat Pedoman pendatan dan pendayagunan data profil desa dan kelurahan Kegiatan pemanganan sosial budaya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerint	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Repiatan pengembangan sarana tas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penangulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penganganan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profili desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan penangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayaganaan data profil desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayaganaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan penangkanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dala lembaga kemasyarakatan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penngdanan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Regiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasy	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayaganaan data profil desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayaganaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan penangkanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dala lembaga kemasyarakatan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembanguan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pennagganah bencana yang dibiayai APBD Provinsi vintuk desa dan kelurahan Kegiatan pennaganan bancana yang dibiayai APBD Provinsi vintuk desa dan kelurahan Kegiatan pennaganan bancana yang dibiayai APBD Provinsi vintuk desa dan kelurahan Kegiatan pennaganan bancana yang dibiayai APBD Provinsi vintuk desa dan kelurahan Kegiatan pennaganan bancana yang dibiayai APBD Provinsi vintuk desa dan kelurahan Regiatan pennaganan bancana yang dibayai APBD Provinsi vintuk desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan pengaharganan abang	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi penanggunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penngkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penngkatan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Regiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian pengaturan kewanangan kabupaten/Kota kepa	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pendengan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pennanganan bencanan yang dibiayai APBD Provinsi vintuk desa dan kelurahan Kegiatan pennanganan bencanan yang dibiayai APBD Provinsi vintuk desa dan kelurahan Kegiatan pennanganan banbar daya alam dan pengabangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengaman banbar daya alam dan pengabangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Regiatan pengabargan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakata	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumiah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa,akelurahan Sasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penngganan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sarsan dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan penagayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan penagkat ma	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan tugan dari provinsi kepada Pemerintahan desa dan kelurahan bersakala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penngkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penngkatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian senghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, kepala desa Pene	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penangulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat didesa dan kelurahan yang diblayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman belaksanaan ugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman belaksanaan keuargan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pengepalan asama dan prasarana dasa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pengepalana sakan dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Pemberian sanski atas penyingmangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumiah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggalangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan tehrologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberdaana kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanggalangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangdanan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penangdanan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penangdanan bencana yang dibiayai APBD Provinsi van y	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumiah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat an desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakat asa penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembirana Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desalkelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desalkelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberdaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adal istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Peadoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pennanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pennanganan bencana daya alam dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pennanganan bencana daya alam dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Pemberian sanskai atas penyimpangan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Pemberian sanskai atas penyimpangan yang dibiayai APBD Provinsi yang pa	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Penetitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumiah kegiatan yang terkati dengan upaya percepatan atau skeelerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desalkelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desalkelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberdaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelakasanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumiah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pennagrahan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan pengedaban sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Desa Penetapan pengaturan kewenangan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 tali 1 tali 1 tali 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis
Penelitain dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumiah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atua seselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkalan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibaya PBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi kepada Pemerintahan desa kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fesalitasi Pelakasanan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumiah kegiatan penalikikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangkangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penangkara pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penangharaban sumber daya alam dan pengembangan teknologi peng ugan yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan pengayaumaan adata profil desa dan kelurahan Kegiatan penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, keputusan Lurah dan penghargan p	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Penetitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kepiatan yang terkati dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan iatau akselerasi pembangan apasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan pendikisi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Regiatian pendikisi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Pedoman pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kulrah Jumlah kegiatan pendikikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang dibayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penangana pangan pangan dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, kurah dan perangkat masing-masi	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 tali 1 tali 1 tali 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis
Penelitain dan pengkajain penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumtah kegiatan yang tekati dengan upaya percepatan atau skelerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi [beat] guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembiraan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegiatan Isalitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitasi Pelakananan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelathan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan bersakal provinsi Kegiatan penanganan bencana yang dibiayal APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayal APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayal APBD Provinsi di dasa dan kelurahan Kegiatan penangharan atas presarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi di dasa dan kelurahan Kegiatan penangharan atas presaran desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi di dasa dan kelurahan Kegiatan penanghargan atas presatasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penahargan atas presatasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penahargan atas presatasi yang dilakukan kepala Desa Pedoman teknis penyusuan peranaman administrakat hed	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Penelitain dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkat dengan upaya percepatan atau skelerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulanga kemiskinan, percepatan atau skelerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan sumber daya alam dan teknologi tepat giuan, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman belaktana tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman belaktana keuangan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman belaktana keuangan dari provinsi ke desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penganganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penganganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi i disa dan kelurahan Kegiatan pengengakan pengapan yang dibiayai APBD Provinsi i disa dan kelurahan Kegiatan pengenbangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Regiatan pemangatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi i disa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Peneltian dan pengkajan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kejalan yang terkait dengan upaya percepatan alau akselvarias pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan tenkologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayal APBPN Pemberian penphargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakati dase dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakati dase penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman bantuan kewangan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan kewangan dari provinsi Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa-kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan penangulangan kemiskinan yang dibiayal APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penangulangana henciasi yang dibiayal APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan benciasi yang dibiayal APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan benciasi yang dibiayal APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Regiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 2 jenis 1 jenis 2 jenis 1 jenis 2 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis
Penelitah dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumiah kejatan yang tekait dengan puaya percepatan alua skelerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan tekenlogi tepat gunga, pengembangan sosial budaya masyarakat di dase dan kelurahan yang dibiayal Ayang masyarakat di dase dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakati dase dase dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakati dase penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman bantuan kewangan dari provinsi ke desa/kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penanganan bencana yang dibayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan Kegiatan penganan bencana yang dibayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penganan bencana yang dibayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan Kegiatan penganan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pemberina sanisti atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberina penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan Pedoman bekinsi penyusunan perencamaan p	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis
Penellitan dan pengkajan perwelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumiah kepilan yang terkait dengan upaya percepatan alau aksedrasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan alau aksedrayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana penaegaankeniskinan, percepatan alau aksedrayaan masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatian Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi Kegistan fasilitiasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan Fasilitiasi Pelaksanaan upendikan dan pelapatan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan keragan pengengan pengenganan pengengan pengenganan pengenganan pengenganan pengenganan pengengan pengenganan pengengan pengenganan pengengan pengenganan pengenganan pengengan pengengan pengengan pengengan pengengan pengenganan pengengan pengen	0 kegiatan 2 jenis 0 kali 0 kali 1 1 1 1 1 1 1 2 kegiatan 1 jenis 0 jenis 1 jenis 0 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 2 jenis 1 jenis 2 jenis 1 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis

Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan Imlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Imlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kelurahan Imlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Imlah Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Inlah kegiatan fasilitasi penatayagunaan data perundangan Imlah kegiatan fasilitasi penatayagunaan data profil desa dan kelurahan Imlah kegiatan fasilitasi penatayagunaan data profil desa dan kelurahan Imlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Imlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Imlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Imlah kegiatan fasilitasi penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Inlah kegiatan fasilitasi penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan dan pemeliharaan Inlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan heriasam desa/kelurahan dengan pinak ketiga senataran hasil pembangunan. Ikali Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Ikali Imlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kepiasama desa/kelurahan dan pasca perlombaan Inlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar leembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dan gan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan Ikali Imlah kegiatan fasilitasi bentuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya Ikali Imlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya		
Imlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Imlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Imlah Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Isilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Isilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Isilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan Imlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Imlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Isilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Isilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Isilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga Isilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Isilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan Isilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat Isilitasi kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali	Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	1 kasus
Imlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Imlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan Imlah Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa Isilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Isilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Isilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan Imlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Imlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Isilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Isilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Isilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga Isilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Isilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan Isilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat Isilitasi kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali		
Imlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan sailitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan Il 0 kali Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 2 kali sailitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 2 kali sailitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 2 kali sailitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan Imbaga kemasyarakatan Il kali Imlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Il kali sailitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Il kali sailitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Il kali sailitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan Il kali sailitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan prencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Il kali sailitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga Il kali sailitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Il kali sailitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan Il kali sailitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan Il kali sailitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya Il kali	4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan	
asilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 10 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 2 kali asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 2 kali asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 2 kali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 2 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan 2 kali umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 3 tali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan 3 tali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan 4 tali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan 4 tali asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 4 kali anlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 4 tali anlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan jura perlombaan dan pasca perlombaan arta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat anlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan anlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali anlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali anlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali	Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	10 kali
Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 2 kali asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 2 kali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 2 kali milah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan I kali anilah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan reta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 2 kali anilah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 1 kali anilah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan arta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat anilah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan anilah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali anilah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	6 kali
asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 2 kali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 2 kali milah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan 1 kali asilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan 1 kali milah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan rata pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. 1 kali asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 2 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 1 kali milah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan inta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat 1 kali ali liali kali liali liali kali liali liali kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan liali kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	10 kali
asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	2 kali
Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali sailitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan 1 kali umlah kegiatan hasil pembangunan. 1 kali umlah kegiatan fasilitasi peritapan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 2 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 1 kali umlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan jurar perlombaan dan pasca perlombaan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali umlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali umlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan	2 kali
mbaga kemasyarakatan mlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sailitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan 1 kali mlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tra pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. sailitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 2 kali mlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 1 kali mlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan umlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan 1 kali tali lakii l	Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	2 kali
asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan 1 kali umlah kegiatan hasil pembangunan. 2 kali umlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 2 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 1 kali umlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat 1 kali umlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	1 kali
Imlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan 1 kali asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 2 kali Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat I kali IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1 kali
erta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. 2 kali sasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 2 kali simlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 1 kali simlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan simlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan sirta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat simlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali sirta pengembangan dan pelestarian hasil pembaga kemasilasi kerjasama dan kejatan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan sirta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat sirta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat sirta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat sirta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat sirta dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan sirta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	1 kali
Imlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Inlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan Inlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan Inlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan Inlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya Itali	Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	1 kali
Imlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan Imlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan I kali I kali Imlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali	Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	2 kali
ımlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan dali kali erta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat malah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 kali
erta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat "Nall Imlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya 1 kali	Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	1 kali
	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	1 kali
ımlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. 1 kali	Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	1 kali
	Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	1 kali

KAB. SIDOARJO, 25 Februari 2024 SIMOANGIN-ANGIN KERITERIAN WONDAYU KERLAJ BERSAL SENDARJO

KUSINIADI Kepala Desa

Tembusan : 1. Camat Wonoayu 2. Bupati KAB. SIDOARJO 3. Arsip